

LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Halaman 1

KONSEP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Antam menyadari bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan perlu mengutamakan keselamatan, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta berpartisipasi mengembangkan masyarakat di sekitar kegiatan. Di setiap aspek kegiatan dan lokasi kerja, prinsip-prinsip ini menjadi nilai yang dianut. Selain itu, operasi penambangan tidak hanya memerlukan lisensi formal yang berbentuk ijin eksplorasi atau eksploitasi, melainkan juga dukungan sosial itulah yang mengamankan kegiatan penambangan, dan hanya akan diperoleh bila masyarakat di sekitar lokasi tidak dirugikan, melainkan memperoleh manfaat atas keberadaan perusahaan.

Bagi Antam, implementasi pembangunan berkelanjutan harus bermakna dan relevan pada setiap situasi. Pemahaman ini, penerapan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*, CSR) Antam yang dapat dilakukan di tataran lokal, sekalipun berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku internasional. Pada intinya, Antam berupaya "menghidupkan" konsep pembangunan berkelanjutan ini dengan implementasi kerja efektif sehari-hari. Hal ini dicapai dengan adanya panduan operasional bagi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan Antam.

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

Standar Etika Perusahaan merupakan petunjuk praktis dan pedoman perilaku yang harus dipatuhi dalam berinteraksi dengan semua pihak serta harus dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan. Hal-hal yang diatur dalam Standar Etika Perusahaan diantaranya mengenai Persamaan dan Penghormatan pada HAM, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Pertambangan (K3LP), Kesempatan Kerja yang Adil, serta Benturan Kepentingan. Pelanggaran terhadap Standar Etika akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan dan tidak meniadakan kepada pihak yang berwenang.

Sebagaimana tercantum dalam Standar Etika Antam, perusahaan percaya bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu yang universal. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, Antam berkewajiban mendorong usaha-usaha untuk terpenuhinya hak asasi manusia serta Antam berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasi tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dari masyarakat sekitar.

Dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan PKP Antam memiliki komitmen untuk memastikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Pertambangan yang tinggi. Antam berkomitmen untuk memastikan kesempatan kerja yang adil, termasuk di dalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi.

Antam menyadari bahwa setiap Insan Antam mempunyai hak untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan perusahaan. Kegiatan lain yang sah di luar pekerjaan Insan Antam dengan tetap memperhatikan kewajiban Insan Antam ke perusahaan tersebut harus sah dan bebas dari konflik kepentingan. Insan Antam tidak boleh menyalahgunakan pengaruh Antam sehingga dapat mendiskreditkan nama baik dan reputasi Antam.

PENGELUARAN LINGKUNGAN HIDUP

Antam bercita-cita mencapai kondisi "Zero Harm" bagi karyawan, mitra kerja, masyarakat di lingkungan kerja, dan menjadi pemimpin dalam praktik pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

Antam menganut falsafah bahwa penggunaan lahan dalam rangka mengusahakan kekayaan mineral secara bertanggung jawab, dan akan semaksimal mungkin mengembalikan fungsi asli lahan setelah penambangan selesai. Hal ini dijabarkan antara lain dalam penggunaan sistem, metode, peralatan, dan bahan yang memiliki dampak negatif yang minimal bagi lingkungan, penggunaan sumber daya alam secara optimal dalam rangka konservasi dan minimalisasi limbah, dan pemenuhan ketentuan-ketentuan dokumen lingkungan dalam setiap kegiatan operasi, kepemilikan prosedur bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lingkungan, serta kepemilikan rencana penutupan tambang dan pasca tambang pada setiap kegiatan penambangan. Sejak tahun 2000, UBP Nikel Pomalaa telah mematuhi ISO14001 (Sistem Manajemen Lingkungan), sementara sertifikasi ISO14001 UBP Emas Pongkor diperoleh di tahun 2005.

Pada tahun 2005, kedua unit bisnis utama Antam kembali mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Penilaian PROPER di tahun 2005 memberikan peringkat kepada UBP Nikel Pomalaa dan UBP Emas Pongkor yang didasarkan pada implementasi pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sistem manajemen lingkungan, manajemen penggunaan sumber daya alam, hubungan dengan masyarakat sekitar. Dalam pemeringkatan PROPER, warna emas merupakan peringkat tertinggi, hijau, biru, merah dan hitam. Peringkat UBP Nikel Pomalaa di tahun 2005 membaik setelah sebelumnya peringkat Merah. Perubahan menjadi peringkat Biru, dikarenakan masalah pengelolaan slag nikel yang selama ini menjadi perhatian perusahaan dan KLH telah mencapai titik temu tentang pengelolaan yang harus dilakukan.

Pada tahun 2005, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta kegiatan rehabilitasi lahan

giatan pertambangan menelan biaya Rp21,5 miliar atau turun 3% dibandingkan tahun 2004. Untuk tat mengalokasikan dana sebesar Rp 42,5 miliar untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan deng diantaranya pengelolaan limbah akibat kegiatan pertambangan, rehabilitasi lahan terganggu dan terkait dengan penutupan tambang pada beberapa lokasi Antam.

rogram rehabilitasi lahan terganggu pada tahun 2005 berhasil merehabilitasi 240,92 hektare atau turun 23, tahun 2004 dengan biaya Rp10,2 miliar. Rehabilitasi lahan terganggu di tambang nikel Gebe yang telah ditutup 2004 juga berlanjut dengan rehabilitasi 540,2 hektar dari total lahan seluas 647 hektar yang akan direhabilitasi. Rehabilitasi lahan terganggu di tambang pasir besi Cilacap yang juga telah ditutup, Antam telah merehabilitasi lahan target lahan yang direhabilitasi mencapai 630,3 hektare. Semenjak program rehabilitasi lahan terganggu 1990, total lahan yang telah direhabilitasi mencapai 3.066 hektar dengan target rehabilitasi lahan seluas 3.660 hektar tahun 2006.

Per 31 Desember 2005, Antam mencadangkan Rp76,8 miliar untuk penyisihan kewajiban pengelolaan lingkungan. Penyisihan ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan dana bagi program pengelolaan lingkungan hidup. Komponen biaya diluar biaya operasional rutin tahunan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Halaman 3



LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Halaman 2

Sebelum

PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Antam memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat sekitar kegiatan pertambangan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada di lingkungannya. Konsep CSR Antam yang bersifat lokal berarti pengembangan masyarakat diselenggarakan dengan program Pemerintah Daerah setempat dan/atau instansi terkait untuk memperhatikan sosial budaya masyarakat dan kemampuan unit bisnis.

Pada tahun 2005, selain kegiatan pengembangan masyarakat yang bersifat rutin seperti bantuan pembangunan prasarana umum, bantuan bidang pendidikan dan kesehatan maupun pemberian prioritas bagi usahawan setempat untuk menjadi mitra kerja Antam, kegiatan pengembangan masyarakat juga diarahkan pada anggota masyarakat kurang mampu di daerah perkotaan. Selama bulan Oktober-Desember 2005, Antam bekerja sama dengan mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam AIESEC (organisasi nirlaba yang bersifat global, independen dan dijalankan oleh lulusan baru dari perguruan tinggi) serta Dielts Foundation menyelenggarakan pelatihan komputer, bagi kewirausahaan kepada anak-anak jalanan. Antam memberikan sumbangan dana maupun sumber daya manusia ini. Sebagai puncaknya, diadakan acara pengumpulan dana dengan melelang hasil karya anak-anak jalanan tersebut untuk mengumpulkan dana Rp16 juta. Pada tahun 2005 Antam juga terus mengadakan pertemuan reguler dengan anggotanya pemerintah setempat serta lembaga swadaya masyarakat agar bantuan perusahaan lebih terarah serta untuk masukan atas program yang dijalankan.

Selama tahun 2005, Antam mengeluarkan Rp17 miliar untuk kegiatan pengembangan masyarakat, naik 12% dari tahun 2004. Pengeluaran terbesar kegiatan pengembangan masyarakat adalah untuk bantuan korban tsunami sebesar 10 miliar. Untuk korban tsunami, di luar bantuan keuangan Antam juga mengirimkan tim medis, obat-obatan, alat pemurnian air guna memperoleh sumber air bersih. Untuk tahun 2006, Antam mengalokasikan Rp16 miliar untuk pengembangan masyarakat. Selain biaya pengembangan masyarakat, perusahaan juga menyalurkan dana modal melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang disisihkan dananya dari 1% laba bersih. Sejak tahun 1992, melalui program PKBL Antam telah membina 1.806 mitra binaan.

PERTAMBAHAN PELAKU PETI

Jumlah pelaku PETI di luar tambang emas Pongkor relatif tidak berubah dari tahun sebelumnya, yakni berkisar antara 100-150 orang. Kegiatan PETI berlokasi di wilayah permukaan di atas deposit milik Antam yang berlokasi di bawah tanjakan nasional Gunung Halimun. Deposit emas yang berada di permukaan tidak boleh ditambang karena merupakan deposit nasional. Pada tahun 2005 tidak terjadi gangguan pelaku PETI terhadap operasi tambang. Risiko PETI hanya diidentifikasi sebagai komoditas emas Perusahaan.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, upaya perusahaan untuk menekan jumlah pelaku PETI adalah komitmen sosial, ekonomi dan keamanan. Program-program pemberdayaan masyarakat serta upaya penertiban pelaku PETI dan konsisten terus dilakukan bersama dengan berbagai pihak yang terkait seperti aparat keamanan, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah serta masyarakat sekitar.

Halaman 3

Sebelum

PT ANTAM Tbk

Gedung Aneka Tambang, Jl. T.B. Simatupang No. 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530
Phone: (62-21) 789-1234 (62-21) 781-2653 Fax : (62-21) 789-1234 Email : corsec@antam.com

APORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Halaman 5

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Antam menganut falsafah bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah integral dari kegiatan bisnisnya. Untuk mencapai target kecelakaan kerja, Antam menyediakan semua peralatan keselamatan kerja sesuai dengan pekerjaan, dan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku di lingkungan kerja yang aman dan sehat. Di seluruh aspek kegiatan, Antam memberlakukan Kebijakan Keselamatan Kerja yang ketat, disertai sanksi setiap pelanggaran yang terjadi, yang juga menjadi komponen anggaran.

Dalam hal kesehatan kerja, Antam menyediakan layanan kesehatan (mempertahankan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan) bagi karyawan dan keluarganya. Sedangkan bagi keluarga diberikan bantuan layanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif. Karyawan diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin setahun. Mereka yang tidak fit untuk menjalankan pekerjaannya, diwajibkan pengobatan dan pemulihan.

Setiap karyawan maupun mitra kerja diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang disediakan di lokasi kerja. Bergantung pada lokasi dan jenis tambang, APD dapat berupa: pakaian keselamatan, safety helmet, mine spot lamp, safety belt, pelindung pendengaran, pelindung pernapasan, kacamata pengaman, dan sarung tangan. Para tamu yang mengunjungi lokasi tambang juga diwajibkan menggunakan APD, serta terlebih dahulu mengikuti pengenalan tentang keselamatan (safety induction) dan menandatangani pernyataan patuh pada peraturan yang berlaku.

Pada bulan September 2005 terjadi ambrukan di level 500 Ciurug, tambang emas Pongkor yang mengakibatkan satu pekerja dan dua orang pekerja lainnya luka ringan. Kecelakaan terjadi saat pekerja tambang telah selesai melangkah dari lokasi kejadian dan tengah bersiap-siap mengisi Danfo (bahan peledak) untuk meledakkan dinding terowongan pencarian bijih emas ketika tiba-tiba terjadi ambrukan batuan dan tanah dari roof (atap). Antam telah melakukan penyelidikan dan menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban.

Pada tahun 2005, Antam kembali memperoleh penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Departemen Sumberdaya Mineral melalui UBP Nikel Operasi Pomalaa, UBP Emas Pongkor, UBPP Logam Mulia, serta UP Pasir B

PASCA TAMBANG

Karakteristik industri tambang yang mengolah sumber daya tidak terbarukan menjadikan aspek pasca tambang merupakan tambahan di luar pengembangan masyarakat maupun pengelolaan lingkungan. Antam berpendapat bahwa kegiatan pasca tambang masyarakat sekitar tetap harus berjalan meskipun kegiatan pertambangan sudah berakhir. Dalam setiap kegiatan penambangan Antam selalu memiliki rencana pengelolaan lingkungan, penutupan tambang dan pasca tambang yang direvisi oleh Komite Lingkungan dan Pasca Tambang yang merupakan Komite di tingkat Komisaris. Bagi Antam, rencana penutupan tambang dan pasca tambang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada setiap kegiatan pertambangan.

Di tahun 2005, program pasca tambang yang dijalankan berada di tambang nikel Gebe, tambang emas Cikotok dan tambang besi Cilacap. Di Gebe, Antam telah memperoleh persetujuan rencana penutupan tambang oleh pemerintah dan Menindaklanjuti nota kesepahaman dengan teman Kelautan dan Perikanan di tahun 2002, Antam dan masyarakat Gebe dan pihak ketiga telah memulai pengembangan industri perikanan dengan melakukan pemasa menambak jumlah kapal penangkap ikan. Sementara itu di tambang pasir besi Cilacap, Antam tengah mengkaji dipergunakan oleh pemerintah setempat. Di Cikotok, Antam tengah menjajaki kerja sama dengan pihak pemerintah memanfaatkan dan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) yang ada. Selain itu, di Cikotok di jajaki lain terkait dengan pertanian dan perkebunan. Kegiatan pasca tambang di Kijang berfokus pada menambak rencana penutupan tambang, seiring reklasifikasi cadangan yang non ekonomis menjadi ekonomis akibat tingginya

Halaman 6

PT ANTAM Tbk

Cedung Anak Tambang, Jl. T. P. Simatupang No. 1, Lingsar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12520

PENGUNGKAPAN KINERJA SOSIAL: WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN KEPADA PUBLIK

Firma Sulistiyowati

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Abstract

Disclosure of corporate social performance will be urgently expected. It can be reported by financial and non financial information in annual report or social report separately. Pollution, depletion of resources, waste, product quality and safety, the rights and status of workers, and the power of the large corporations are issues which have become the focus of increasing attention and concern. This paper discusses how corporations must disclose social performance reporting as the responsibility of corporations to the public.

Key words: disclosure, corporate social performance.

1. PENDAHULUAN

Selama kurang lebih 30 tahun terakhir ini kesadaran publik akan peran perusahaan di masyarakat telah mengalami perkembangan yang pesat. Banyak perusahaan yang telah berjasa dalam kemajuan ekonomi dan teknologi justru mendapat kritikan karena kurang memperhatikan masalah sosial. Polusi, deplesi sumber daya, limbah, kualitas dan keamanan produk, hak dan status pekerja, serta kekuasaan dari perusahaan besar menjadi isu-isu penting yang mendapat perhatian banyak pihak (Gray, 1987:1). Tekanan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis ditujukan tidak hanya pada perusahaan swasta tapi juga perusahaan publik. Oleh karena itu perusahaan perlu akuntabel kepada masyarakat luas, bukan hanya pada kelompok tertentu seperti pemegang saham dan kreditur saja. Menurut Friedman (1962) perusahaan perlu memiliki pertanggungjawaban sosial untuk memaksimalkan profit. Sedangkan menurut Holmes (1976) dan Ostlund (1977)

perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat, bahkan jika perlu mengurangi profit.

Peningkatan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan bertambah dengan adanya kritik mengenai penggunaan profit sebagai ukuran kinerja perusahaan secara *all-inclusive*. Untuk merespon hal tersebut, beberapa institusi akuntansi mulai mempertimbangkan akuntansi sosial perusahaan pada pertengahan tahun 1970-an (Ramathan, 1976). Kemajuan selanjutnya adalah banyak peneliti yang mulai melihat akuntansi sosial perusahaan melalui perspektif teoritis yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya *stakeholder theory*, *social contract theory* dan *legitimacy theory*

Meskipun kurangnya konsensus dalam profesi akuntansi dan literatur akuntansi secara teoritis tentang bagaimana perusahaan harus mengungkapkan informasi pertanggungjawaban sosial, namun telah terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang secara sukarela mengungkapkan aktivitas pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya. Pengungkapan sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai pengungkapan informasi finansial dan non finansial yang berhubungan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan secara fisik dan sosial, seperti yang dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial secara terpisah (Guthrie and Mathew, 1985), termasuk di dalamnya lingkungan secara fisik, energi, sumber daya manusia, dan hal-hal yang terlibat dalam masyarakat.

Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana dan seberapa jauh perusahaan mengungkapkan kinerja sosial sebagai salah satu bukti pertanggungjawaban perusahaan kepada publik.

2. TEORI UNTUK MENGANALISIS DAN MENJELASKAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN

Beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban sosial perusahaan antara lain (Moir, 2001):

2.1. Stakeholder Theory

Stakeholder theory merupakan teori yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisa suatu kelompok, kepada siapa perusahaan bertanggung jawab. Menurut Freeman (1984), perusahaan digambarkan sebagai kumpulan dari hubungan-hubungan para *stakeholder*. Definisi klasik Freeman mengenai *stakeholder* adalah kelompok atau beberapa individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian sasaran organisasi (Freeman, 1984:46). Secara khusus, *stakeholder* dianalisis menjadi dua kelompok, yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer merupakan orang yang sangat dibutuhkan partisipasinya bagi kelangsungan hidup perusahaan (Clarkson, 1995:106). Yang termasuk di dalam kelompok *stakeholder* primer adalah *shareholder*, investor, karyawan, pelanggan, pemasok, dan kelompok *stakeholder* publik, yaitu pemerintah, kepada siapa perusahaan membayar pajak dan masyarakat, sebagai penyedia infrastruktur dan pasar. *Stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai orang yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi tidak berpengaruh penting bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Berkaitan dengan isu pertanggungjawaban sosial, isu utama yang berkaitan dengan analisa *stakeholder* adalah motivasi perusahaan untuk bertanggung jawab kepada *stakeholder*. Pertanggungjawaban sosial perusahaan harus didasarkan pada tujuan dan nilai-nilai yang memberikan kontribusi pada reputasi dan keberhasilan perusahaan (*Business Impact*, 2000:101). Mitchell (1997), mengembangkan model pengelompokan *stakeholder* berdasarkan atribut kekuatan, legitimasi dan kepentingan. Oleh karena itu diharapkan perusahaan akan menaruh perhatian besar terhadap kelompok *stakeholder* yang sah, yang memiliki kekuatan dan kepentingan.

2.2. Social Contract Theory

Gray (1996) mengemukakan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan dari kontrak sosial antara anggota masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Dalam

konteks pertanggungjawaban sosial perusahaan, perusahaan bertindak bukan karena kepentingan komersial, namun karena harapan implisit masyarakat agar perusahaan beroperasi.

Donaldson and Dunfee (1994) mengembangkan teori kontrak sosial yang terintegrasi sebagai cara manajer untuk mengambil keputusan dalam konteks etis. Keduanya membedakan antara kontrak makrososial dan mikrososial. Kontrak makrososial dalam konteks masyarakat, misalnya harapan bahwa perusahaan akan memberikan dukungan pada masyarakat lokal dan secara khusus bentuk keterlibatan tersebut akan menjadi kontrak mikrososial. Oleh karena itu, perusahaan yang mengadopsi suatu pandangan kontrak sosial harus menjelaskan keterlibatan mereka sebagai suatu bagian dari harapan masyarakat, yang dapat menjelaskan motivasi awal, yang mungkin tidak dijelaskan secara keseluruhan atas keterlibatan mereka. Salah satu manfaat komersial hasil studi di Australia (CCPA, 2000) adalah perlunya ijin beroperasi khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam. Hal tersebut mungkin dianggap sebagai manfaat komersial dari naiknya reputasi, tapi juga menghubungkan pencapaian dan pemeliharaan legitimasi (Suchman, 1995).

2.3. Legitimacy Theory

Suchman (1995) mendefinisikan legitimasi sebagai suatu persepsi atau asumsi yang digeneralisasi merupakan tindakan dari entitas yang diinginkan, layak atau sesuai dalam beberapa sistem yang dibangun dari norma-norma, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, maupun definisi-definisi secara sosial. Mengacu pada literatur terdahulu mengenai manajemen legitimasi, termasuk di dalamnya *the strategic traditions dependence theory* (Pfeffer and Salancik, 1978) dan *the institutional traditions* (DiMaggio and Powell, 1983), Suchman mengidentifikasi tiga tipe legitimasi organisasional, yaitu: (1) pragmatik; (2) moral; (3) kognitif. Ia juga mengidentifikasi tiga tantangan kunci dari manajemen

legitimasi, yaitu (1) pencapaian; (2) pemeliharaan; dan (3) perbaikan legitimasi. Suchman menyatakan bahwa "manajemen legitimasi terletak pada komunikasi", sehingga untuk menerapkan teori legitimasi perlu menguji bentuk-bentuk komunikasi perusahaan. Linblom (1994) mencatat bahwa legitimasi bukan merupakan suatu proses yang lunak bagi organisasi untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Ia menyatakan bahwa organisasi mungkin menggunakan empat strategi legitimasi saat menghadapi ancaman legitimasi yang berbeda-beda. Keempat strategi tersebut adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada para *stakeholder* mengenai tujuan organisasi meningkatkan kinerja.
2. Mengubah persepsi organisasi (tanpa mengubah kinerja aktual organisasi).
3. Mengalihkan isu-isu yang menjadi perhatian.
4. Mengubah harapan-harapan eksternal tentang kinerja.

Legitimasi tampaknya merupakan alasan kunci untuk menjalankan perilaku sosial perusahaan dan menggunakan aktivitas-aktivitas tersebut sebagai bentuk publisitas atau pengaruh (Gray, 1996 & Clarke, 1998). Pandangan yang berlawanan dengan hal tersebut, misalnya perusahaan menggunakan kekuatan untuk melegitimasi aktivitas namun, lebih dari itu masyarakat memberi kekuatan pada perusahaan untuk menggunakan tanggung jawabnya. (Wood, 1991). Masyarakat memberi kekuasaan dan kekuatan pada perusahaan. Dalam jangka panjang, perusahaan yang tidak menggunakan kekuasaan dan kekuatan tersebut akan cenderung kehilangan itu semua.

Pengujian praktik-praktik pertanggungjawaban sosial perusahaan bisa dimulai dari dalam perusahaan dan didorong oleh prinsip-prinsip yang tertuang dalam teori kontrak sosial, dianalisis secara khusus dengan *stakeholder analysis* untuk meningkatkan reputasi dan legitimasi perusahaan. Hal tersebut merupakan cara untuk menilai praktik pertanggungjawaban sosial perusahaan sekaligus cara untuk menilai kinerja (Moir, 2001).

3. KINERJA SOSIAL PERUSAHAAN

Masyarakat dan perusahaan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling menguntungkan. Di satu pihak, masyarakat menyediakan sarana infrastruktur bagi berlangsungnya perusahaan dan di pihak lain perusahaan harus memberikan pertanggungjawaban sosialnya kepada masyarakat (Imam, 2000:133).

Studi empiris mengenai kinerja sosial telah lama dilakukan, antara lain oleh dua organisasi yaitu *American Accounting Association (AAA) Committee on Accounting for Social Performance* pada tahun 1975 dan *National Association of Accountants (NAA) Committee on Accounting for Corporate Social Performance* pada tahun 1977, yang menitikberatkan pada pengukuran dan pelaporan sosial.

Menurut *NAA Committee on Accounting for Corporate Social Performance*, kinerja sosial perusahaan berkaitan dengan refleksi dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat. Aktivitas-aktivitas tersebut berkaitan dengan hukum, pengukuran penyelesaian atau persyaratan kontrak (Porwal, 1993:318). Komite tersebut juga mengelompokkan kinerja sosial ke dalam empat area, yaitu:

1. Pengembangan masyarakat (*community development*), termasuk di dalamnya aktivitas-aktivitas yang berorientasi sosial, terutama yang bermanfaat bagi publik, misalnya pembangunan perumahan, pelayanan kesehatan, program pangan, dan program-program kemasyarakatan yang lain.
2. Sumber daya manusia (*human resources*), merupakan area dari kinerja sosial yang berhubungan langsung dengan para pekerja atau karyawan perusahaan, sebagai contoh pemberdayaan karyawan, pelatihan karyawan, kebijakan promosi, dan peraturan-peraturan yang menguntungkan karyawan.
3. Kontribusi produk atau jasa (*product or service contribution*), termasuk di dalamnya konsumerisme, kualitas produk, pengepakan, serta jaminan dan keamanan produk.
4. Kontribusi sumber daya fisik dan lingkungan (*physical resources and environmental contribution*), meliputi

aktivitas-aktivitas yang berhubungan langsung dengan pencegahan pencemaran lingkungan (polusi), seperti polusi udara, polusi air, polusi suara, konservasi kelangkaan sumber daya, dan pembuangan sisa zat padat.

Berdasarkan keempat area di atas, *NAA Committee* mendefinisikan akuntansi sosial sebagai berikut:

Akuntansi sosial merupakan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan dampak sosial dan ekonomis dari suatu institusi kepada masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan manajerial secara internal dan tujuan akuntabilitas eksternal serta pertumbuhan terhadap perubahan nilai-nilai yang menuntun masyarakat kepada pendefinisian kembali ide tanggung jawab sosial perusahaan.

Sedangkan menurut *AAA Committee on Accounting for Social Performance*, akuntansi sosial meliputi: akuntansi dan evaluasi dampak program pertanggungjawaban sosial perusahaan, akuntansi sumber daya manusia, pengukuran biaya sosial, mengukur dampak perusahaan secara keseluruhan terhadap masyarakat, pelaporan sosial dan akuntansi untuk program publik (pemerintah)

Menurut *AAA (1975)* dalam laporan dari *Committee on Social Costs*, menyatakan bahwa ada tiga *level* pengukuran yang termasuk dalam pengembangan akuntansi sosial (Mathews, 1994: 60), yaitu:

Level I, merupakan aktivitas yang dapat diidentifikasi dan dijelaskan, misalnya identifikasi mengenai hal-hal yang mengakibatkan terjadinya polusi.

Level II, merupakan aktivitas yang diukur dengan menggunakan unit non moneter. Material yang menyebabkan polusi diukur tingkat pencemarannya, waktu pencemaran, dan kepatuhan terhadap standar yang ada.

Level III, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menilai dampak pencemaran. Pengukuran tersebut dikonversi ke dalam perkiraan finansial atas

biaya dan manfaat pada semua *stakeholder*, *shareholder*, maupun pihak publik secara umum.

Para peneliti pada umumnya mengakui bahwa kinerja sosial perusahaan multidimensional. Menurut Griffin & Mahon (1997:15), secara konseptual kinerja sosial perusahaan dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu: (1) *people dimension*, yang meliputi masyarakat, perempuan, minoritas, dan hubungan pekerja; (2) *product quality dimension*, yang meliputi kualitas produk dan lingkungan.

4. PENGUKURAN KINERJA SOSIAL PERUSAHAAN

Pelaporan sosial perusahaan yang semakin populer dan keinginan organisasi untuk mengetahui pandangan *stakeholder* mengenai kinerja sosial perusahaan, menimbulkan dua kemungkinan sebagai berikut (Swift, Owen and Humphrey, 2001):

1. Para *stakeholder* tertarik pada perilaku perusahaan, yang mengubah perilakunya dari penekanan utama manajerial menjadi perilaku yang kolaboratif.
2. Keberadaan infrastruktur dari sistem informasi manajemen merupakan tiang penyangga dari keseluruhan proses pelaporan dan penyediaan informasi di balik pembuatan keputusan organisasional.

Paradigma yang benar mengenai kinerja sosial tergantung pada struktur organisasi dan motivasi untuk berinteraksi dengan para *stakeholder*, namun pelaporan sosial juga harus efektif dan direncanakan. Sistem akuntansi sosial mengidentifikasi dan mengukur kinerja sosial, jika organisasi kemudian memilih untuk mengungkapkan informasi tersebut untuk kepentingan transparansi dan keterbukaan, manajemen harus yakin bahwa informasi tersebut benar (Swift, Owen, and Humphrey, 2001)

Sistem informasi yang reliabel mengurangi risiko pelaporan informasi yang tidak akurat yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan. Banyak perusahaan yang mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan *stakeholder*, namun tidak semuanya memilih untuk mengungkapkannya.

menurut penentuan yang dilakukan Swift, Owen, and Humphrey (2001), alat akuntansi manajemen yang paling populer yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaporan sosial adalah *balanced scorecard*, dengan persentase mencapai 96%. *Balanced scorecard* merupakan alat akuntansi manajemen yang komprehensif, yang mampu menjawab kebutuhan *stakeholder* (pelanggan, masyarakat, karyawan) maupun perusahaan itu sendiri. Dari perspektif yang ada, dirumuskan tujuan perusahaan, kemudian ditentukan ukuran-ukurannya. Untuk menerapkan *balanced scorecard* dibutuhkan juga keahlian yang memadai, selain itu yang tidak kalah penting adalah keterlibatan *stakeholder* itu sendiri dalam menghasilkan pelaporan kinerja sosial perusahaan, sehingga tujuan perusahaan untuk menghasilkan laporan tentang aktivitas sosial yang transparan dan akuntabel dapat terwujud.

5. TUJUAN DAN ALASAN PENGUNGKAPAN KINERJA SOSIAL PERUSAHAAN

Menurut Gray, Owen and Maunders (1988), tujuan pengungkapan kinerja sosial perusahaan adalah:

1. Untuk meningkatkan *image* perusahaan.
2. Untuk melaksanakan akuntabilitas suatu organisasi, dengan asumsi bahwa terdapat kontrak sosial antara organisasi dan masyarakat.
3. Untuk memberikan informasi kepada investor.

Sedangkan alasan perusahaan melakukan pengukuran dan pengungkapan kinerja sosial antara lain (Zadek, 1998:1426):

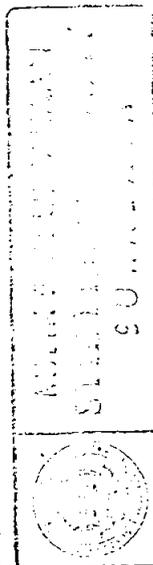
1. Untuk memahami apakah perusahaan telah mencoba mencapai kinerja sosial terbaik sesuai yang diharapkan.
2. Untuk mengetahui apa yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kinerja sosial.
3. Untuk memahami implikasi dari apa yang dilakukan perusahaan tersebut.
4. Untuk memahami apakah praktik yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja sosial tidak merugikan kinerja bisnisnya.

6. KLASIFIKASI PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL PERUSAHAAN

Menurut Zeghal dan Ahmed (1990:43), informasi-informasi sosial yang diungkapkan dalam pelaporan sosial perusahaan antara lain adalah:

1. Lingkungan, meliputi: pengendalian polusi dalam operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan pemrosesan sumber daya alam, konservasi sumber daya alam dan pengungkapan lain yang berhubungan dengan lingkungan.
2. Energi, meliputi: konservasi energi dalam operasi bisnis, produk-produk dengan efisiensi energi, pengungkapan yang berhubungan dengan energi yang lain.
3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi: memperkerjakan kelompok minoritas dan perempuan, kemajuan kelompok minoritas dan perempuan, memperkerjakan kelompok kepentingan khusus yang lain, mendukung bisnis kelompok minoritas, praktik-praktik luar negeri yang bertanggung jawab secara sosial, pernyataan lain mengenai praktik bisnis yang wajar.
4. Sumber daya manusia, meliputi: kesehatan dan keamanan karyawan, pelatihan karyawan, pengungkapan lain mengenai sumber daya manusia
5. Keterlibatan masyarakat, meliputi: aktivitas masyarakat, aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan dan seni dan pengungkapan aktivitas masyarakat yang lain.
6. Produk, meliputi: keamanan produk, pengurangan polusi akibat penggunaan produk, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan produk.
7. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang lain.

Pengungkapan sosial dalam arti luas meliputi hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* (seperti investor, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, pemerintah dan masyarakat). Dalam arti sempit, pengungkapan sosial dikategorikan sebagai penyediaan data terhadap lingkungan fisik (polusi); hubungan dengan



konsumen; sumber daya manusia (kesempatan kerja yang sama); keterlibatan masyarakat; konservasi energi; kesehatan dan keamanan pekerja dan keamanan produk (Epsteir and Freedman, 1994:96)

Di Jepang, pengungkapan informasi sosial dikelompokkan menjadi lima, yaitu (Yamagami and Kokubu, 1991:34-35): lingkungan, keterlibatan masyarakat, hubungan karyawan, penelitian dan pengembangan, dan keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas internasional.

Di Eropa Barat, laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan berisi informasi mengenai (Moir, 2001): tempat kerja, pangsa pasar, lingkungan, masyarakat, etika dan hak asasi manusia.

7. KARAKTERISTIK PERUSAHAAN VS PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL PERUSAHAAN

Beberapa karakteristik perusahaan yang berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial antara lain (Hackstone and Milne, 1996:81-83)

1. Ukuran perusahaan. Perusahaan yang semakin besar akan melakukan aktivitas yang semakin banyak, akibatnya dampak aktivitas tersebut pada masyarakat juga lebih luas. Dengan semakin luasnya dampak aktivitas perusahaan kepada masyarakat, maka semakin banyak pula *shareholder* yang menaruh perhatian pada program-program sosial yang dikomunikasikan dalam laporan tahunan. Davey (1982) dan Ng (1985) gagal mendukung hipotesis tersebut.
2. Lingkup industri. Industri merupakan faktor yang secara potensial mempengaruhi praktik pengungkapan informasi sosial perusahaan. Menurut Diekers and Preston (1977), perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi, seperti industri ekstraktif (pertambangan), lebih menyukai mengungkapkan informasi tentang dampak lingkungan dibandingkan perusahaan yang lain. Perusahaan yang berorientasi pelanggan diharapkan memiliki perhatian yang lebih besar dalam menunjukkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan *image* perusahaan dan menaikkan penjualan (Cowen, 1987).

Menurut Patten (1991), industri berpengaruh terhadap visibilitas secara politik, dan akan memacu pengungkapan mengenai tekanan maupun kritik-kritik sosial. Sehingga ada hubungan positif antara klasifikasi industri dan pengungkapan informasi sosial. Kelly (1981), yang melakukan studi di Australia, menemukan bahwa perusahaan industri primer dan sekunder cenderung mengungkapkan informasi lingkungan dan energi lebih besar dibandingkan perusahaan tersier. Namun hal tersebut berlaku berlawanan untuk informasi yang berkaitan dengan interaksi masyarakat. Sedangkan Cowen (1987), yang melakukan studi di Amerika Serikat, menemukan bahwa kategori industri mempengaruhi pengungkapan tentang energi dan keterlibatan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh Patten (1991) dan Roberts (1992) yang menemukan hubungan positif antara industri berprofil tinggi dengan jumlah pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Sedangkan Davey (1982) dan Ng (1985) gagal menemukan hubungan antara tipe industri dan pengungkapan sosial perusahaan pada perusahaan-perusahaan di New Zealand.

3. Kemampuan menghasilkan laba perusahaan. Hubungan antara pengungkapan informasi sosial perusahaan dan profitabilitas telah dipostulatkan merefleksikan pandangan bahwa respon sosial merupakan salah satu hal yang penting untuk meningkatkan laba perusahaan (Bowman and Haire, 1976). Pengungkapan sosial perusahaan dipercaya dapat merefleksikan aktivitas sosial perusahaan dan merupakan pendekatan manajemen yang adaptif yang sesuai dengan dinamika, lingkungan multidimensional dan kemampuan untuk menemukan tekanan sosial dan respon atas kebutuhan sosial (Hackstone and Milne, 1996:82). Studi empiris mengenai hubungan antara pengungkapan sosial perusahaan dan profitabilitas membuahkan hasil yang beraneka ragam. Bowmann and Haire (1976), Preston (1978) dan Robert (1992) menemukan hubungan positif antara keduanya. Sedangkan Cowen (1987), Patten (1991), Davey (1982), dan Ng (1985) gagal menemukan hubungan antara keduanya. Sementara Belkaoui and

Karpik (1989) menemukan terjadinya konflik hubungan yang sulit diinterpretasikan.

4. Pengaruh dari negara. Andrew (1989) melaporkan bahwa negara mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan sosial perusahaan, meskipun sulit untuk menilai reliabilitas dari hasil tersebut. Sejak studi tersebut dilakukan di perusahaan-perusahaan New Zealand, pengaruh negara pada pengungkapan informasi sosial perusahaan belum diteliti lagi.

8. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PERUSAHAAN UNTUK MENGUNGKAPKAN INFORMASI SOSIAL

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengungkapkan informasi-informasi sosial adalah (Belkaoui and Karpik, 1989:38-40):

1. Rasional umum. Pengeluaran yang bersifat spesifik dan material merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan kinerja sosial. Pengeluaran tersebut juga akan mengurangi laba bersih. Pembentukan *image* dan perhatian terhadap kepentingan publik akan mempengaruhi keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial. Kinerja sosial memiliki dampak yang material terhadap laba bersih yang dilaporkan pada periode sekarang dan variabel-variabel keuangan kunci yang dibatasi perjanjian kontraktual. Sehingga secara rasional, keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial searah dengan penurunan laba bersih yang dilaporkan, yang merupakan hasil dari pengeluaran kinerja sosial. Perusahaan dengan biaya pengontrakan dan pemantauan yang lebih rendah, dan wawasan yang luas akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial. Pengeluaran untuk kinerja sosial akan terjadi jika perusahaan memiliki sumber daya memadai dan kinerja ekonomis yang baik, sehingga keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial juga berkorelasi positif dengan kinerja ekonomis atau profitabilitas. Dari studi yang dilakukan Belkaoui and Karpik ditemukan bahwa keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial berkorelasi positif dengan kinerja sosial, kinerja

ekonomis dan wawasan perusahaan, dan berkorelasi negatif dengan biaya pengontrakan dan pemantauan.

2. Kinerja sosial. Mengukur kinerja sosial adalah hal yang sulit, karena berhubungan dengan isu keefektifan organisasi. Kinerja sosial organisasi tidak dapat dibedakan dengan keefektifan organisasi. (Strand, 1983:90). Kinerja sosial dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara organisasi dengan kebutuhan, harapan, dan permintaan pihak eksternal yang berhubungan secara langsung dengan produk atau pasar perusahaan. (Ullmann, 1985).
3. Variabel keuangan. Perjanjian yang dibatasi, termasuk di dalamnya perjanjian utang akan mengurangi kemampuan manajemen dalam menciptakan transfer kesejahteraan antara *shareholders* dengan *bondholders* (Jensen and Meckling, 1976; Smith and Warner, 1979). Batasan-batasan umum termasuk di dalamnya *financial leverage* (rasio utang jangka panjang pada total aset) dan tingkat pembayaran (dividen untuk laba ditahan yang tidak dibatasi yang tersedia secara maksimum). Keputusan untuk mengungkap informasi sosial sama dengan keputusan melakukan pengeluaran untuk kinerja sosial, dan hal tersebut mengurangi *earnings*.
4. Kebijakan yang diambil. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan pada umumnya dikritisi oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas dasar jumlah yang dilaporkan. Perusahaan dapat memilih teknik akuntansi dan tindakan-tindakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan dan memilih atau mengurangi pandangan politik. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan biasanya terjadi pada perusahaan yang berukuran besar, dan memiliki intensitas modal yang besar pula, sehingga risiko pasar sistematis relatif tinggi. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan juga merupakan respon atas permintaan aktivis-aktivis sosial.
5. Kinerja ekonomis. Hubungan antara pengungkapan sosial, kinerja sosial, dan kinerja ekonomis merupakan ekspresi terbaik dari pandangan bahwa kebutuhan akan respon sosial manajemen sama dengan kebutuhan akan keahlian superior yang akan menjadikan perusahaan

profitable. Menurut Alexander and Buchholz (1978:479), "Kesadaran dan perhatian manajemen terhadap masalah-masalah sosial juga diperlukan dalam meningkatkan kinerja keuangan, sehingga investasi perusahaan menjadi menarik". Perusahaan yang mengungkapkan informasi sosial cenderung memiliki tingkat pengembalian dan pengembalian harga saham diferensial yang lebih besar.

9. MEDIA DAN FORMAT PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL PERUSAHAAN

Media pengungkapan informasi sosial perusahaan secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu (Yamagami and Kokubu, 1991): laporan mandatori/wajib dan laporan sukarela, meliputi: laporan operasi, laporan tahunan, dan laporan hubungan kemasyarakatan.

Di Jepang, sebagian besar informasi sosial perusahaan diungkapkan pada laporan hubungan kemasyarakatan.

Sedangkan format pengungkapan informasi sosial perusahaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: pengungkapan yang bersifat kualitatif, biasanya bersifat deskriptif dan positif dan dilakukan oleh sebagian besar perusahaan dan pengungkapan yang bersifat kuantitatif, biasanya disajikan dengan perhitungan secara moneter dan statistik.

10. LOKASI PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL DAN JUMLAH HALAMAN DALAM LAPORAN TAHUNAN

Ada empat lokasi dalam laporan tahunan yang dipakai untuk mengungkapkan informasi sosial perusahaan, yaitu: laporan direktur, catatan dalam laporan tahunan, bagian terpisah dari laporan tahunan, dan laporan nilai tambah termasuk bagian laporan tahunan, yaitu laporan rugi laba yang dimodifikasi. Biasanya dibuat jika pengungkapan yang ada kurang cukup dan sulit dipahami.

Total halaman yang diperlukan untuk mengungkapkan masalah-masalah sosial dalam laporan tahunan biasanya kurang dari setengah halaman, dan hanya sedikit sekali perusahaan yang memerlukan lebih dari satu halaman untuk mengungkapkan masalah-masalah sosial perusahaan.

11. KENDALA DALAM PENGUNGKAPAN KINERJA SOSIAL PERUSAHAAN

Pengungkapan kinerja sosial perusahaan dalam laporan tahunan telah dilakukan oleh negara-negara maju, seperti Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Singapura dan Malaysia, namun belum banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang. Beberapa kendala yang dihadapi perusahaan, khususnya bagi negara-negara berkembang dalam melakukan pengungkapan kinerja sosial antara lain: (Shiraz, 1998:58-59)

1. Belum terdapat peraturan atau standar baku yang mengatur mengenai pengungkapan kinerja sosial, kebanyakan masih bersifat sukarela.
2. Hanya sedikit perusahaan yang memiliki para akuntan yang kompeten di bidang akuntansi sosial, meskipun dalam hal ini dituntut juga adanya kerja sama dengan para ahli dari bidang lain, seperti hukum, teknik, maupun sosiologi.
3. Perusahaan enggan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit untuk menyusun laporan mengenai kinerja sosialnya, apalagi jika mereka beranggapan bahwa *image* mereka akan tetap baik meskipun mereka tidak memberikan laporan mengenai kinerja sosialnya.
4. Kurangnya perhatian pemerintah negara-negara berkembang terhadap masalah sosial dan lingkungan karena tidak adanya atau kurangnya dana untuk masalah tersebut, sementara itu dukungan dari negara donor maupun institusi keuangan internasional (seperti *World Bank* dan IMF) relatif belum mencukupi.
5. Pembuatan laporan sosial memerlukan waktu yang banyak, sehingga seringkali hal tersebut menyebabkan tertundanya penerbitan laporan tahunan.

12. PENUTUP

Hubungan antara akuntabilitas dan akuntansi sosial telah didiskusikan secara luas. Hal tersebut berkaitan dengan hubungan antara kelompok, individu, organisasi, dan hak-hak untuk mendapatkan informasi (Gray, Dey, dkk, 1997:334). Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa

akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan laporan atas tindakan yang dilakukan seseorang atas tanggung jawab yang yang diembannya. (Gray, Dey, dkk, 1997:334). Sifat hubungan serta hak-hak untuk mendapatkan informasi, termasuk informasi mengenai kinerja sosial perusahaan ditentukan oleh masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan asumsi terdapat kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dan untuk meningkatkan *image* dan reputasi, serta sebagai usaha menjaga kelangsungan hidup perusahaan di masyarakat, sudah sewajarnya perusahaan mengungkapkan kinerja sosialnya kepada masyarakat, sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat. Meskipun banyak kendala yang akan dihadapi, hal tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang akan dipetik oleh perusahaan di masa yang akan datang. Hal yang terpenting adalah ada kesadaran dan usaha, sesuai kapasitas masing-masing perusahaan untuk melakukan perbaikan terus menerus demi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, G.J. and Buchholtz, R.A. (1978), Corporate Social Responsibility and Stock Market Performance, *Academy of Management Journal*, Vol. 21, p: 479-486.
- Andrew, B.H., Gul, F.A., Guthrie, J.E., and Teoh, H.Y. (1989), A Note on Corporate Social Disclosure Practices in Developing Countries: The Case of Malaysia and Singapore, *British Accounting Review*, Vol. 21, No. 4, p: 371-376.
- Belkaoui, A. and Karpik, P.G. (1989), Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol. 2, No. 1, p: 11-21.
- Bowman, E.H. and Haire, M. (1976), Social Impact Disclosure and Corporate Annual Reports, *Accounting, Organizations, and Society*, Vol. 1, No. 1, p: 11-21.

- Business Impact (2000), *Winning with Integrity: A Guide to Social Responsibility, Business in the Community*, London.
- CCPA (2000), *Corporate Community Involvement: Establishing a Business Case*, Centre for Corporate Public Affairs, Melbourne.
- Clarkson, M.B.E. (1995), A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, *Academy of Management Review*, Vol. 20, p: 92-117.
- Cowen, S.S., Ferreri, L.B., and Parker, L.D. (1987), The Impact of Corporate Characteristics on Social Responsibility Disclosure: a Typology and Frequency-Based Analysis, *Accounting, Organizations, and Society*, Vol. 12, No. 2, p: 111-122.
- Davey, H.B. (1982), *Corporate Social Responsibility Disclosure in New Zealand: An Empirical Investigation*, unpublished working paper, Massey University, Palmerston North.
- Diekers, M. and Preston, L.E. (1977), Corporate Social Accounting and Reporting for the Physical Environment: A Critical Review and Implementation Proposal, *Accounting, Organizations, and Society*, Vol. 2, No. 1, p: 3-22.
- DiMaggio, P. J. and Powell, W.W. (1983), The Iron Cage Revisited; Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, *American Sociological Review*, Vol. 48, p: 147-160.
- Donaldson, T. and Dunfee, T.W. (1999), *Ties That Bind*, Harvard Business School Press, Boston, MA.
- Donaldson, T. and Preston, L.E. (1995), The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, *Academy of Management Review*, Vol. 20, p: 65-91.
- Eipstein, M.J. and Freedman, M. (1994), Social Disclosure and the Individual Investor, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol. 7, No. 4, p: 94-109.
- Freedman, M. and Wasley, C. (1983), An Assesment of The Information Content of Social Disclosure", *Proceeding of the Mid-Atlantic Regional American Accounting Association Meeting*, p: 46-54.
- Freeman, R.E. (1984), *Strategic Management. A Stakeholder Approach*, Pitman Publishing, Boston, MA.

- Friedman, M. (1962), *Capitalism and Freedom*, The University of Chicago Press, Chicago, IL.
- Gray, R., Dey, C., Owen, D., Evans, R., and Zadek, S. (1997), Struggling with the Praxis of Social Accounting, *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Vol. 8, No. 2, p: 78-101.
- Gray, R., Kouhy, R., and Lavers, S. (1995), Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure", *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Vol. 8, No. 2, p: 47-77.
- Gray, R., Owen, D. and Adams, C. (1996), *Accounting and Accountability; Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*, Prentice-Hall Europe, Harlow.
- Gray, R., Owen, D and Maunders, K. (1987), *Corporate Social Reporting: Accounting and Accountability*, Prentice Hall, London.
- Gray, R., Owen, D and Maunders, K. (1988), Corporate Social Reporting: Emerging Trends in Accountability and Social Contract, *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Vol. 1, No. 1, p: 6-20.
- Guthrie, J., and Parker, L.D. (1990), Corporate Disclosure Practice: a Comparative International Analysis, *Advances in Public Interest Accounting*, Vol. 3, p: 159-175.
- Guthrie, J, and Mathews, M.R. (1985), Corporate Social Accounting in Australia, in Preston, L.E.,(Ed). *Research in Corporate Social Performance and Policy*, Vol. 7, p: 251-277.
- Hackston, D. and Milne, M.J. (1996), Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies", *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Vol 9, no. 1, p: 77-108.
- Holmes, S.L.(1976), Executive Perceptions of Corporate Social Responsibility, *Bussiness Horizons*, Vol 19, No. 3, p: 34-40.
- Imam, Shaded (2000), Corporate Social Performance in Bangladesh, *Managerial Auditing Journal*, 15/3, p: 133-141.
- Jensen, M.C. and Mckling, W. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure, *Journal of Finacial Economics*, Vol. 3, p: 305-360.
- Jones, T.M. and Wicks, A.C. (1999), Convergent Stakeholder Theory, *Academy of Management Review*, Vol. 24, p: 206-221.
- Kelly, G.J. (1981), Australian Social Responsibility Disclosure: Some Insights into Contemporary Measurement, *Accounting and Finance*, Vol. 21, No. 2, p: 97-104.
- Lindblom, C.K. (1994), *The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure*, paper presented at the Critical Perspectives on Accounting Conference, New York, NY.
- Mitchell, R.K., Agle, B.R. and Wood, D.J. (1997), Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts", *Academy of Management Review*, Vol. 22, p: 853-886.
- Moir, Lance, (2001), What Do We Mean by Corporate Social Responsibility?, *Corporate Governance*, Vol. 1, p: 16-22.
- Ng, L.W. (1985), *Social Responsibility Disclosure of Selected New Zealand Companies for 1981, 1982 and 1983*, Occasional paper No. 54, Massey University, Paalmerston North.
- Ostlund, L.E. (1977), Attitudes of Managers toward Corporate Social Responsibility", *California Management Review*, Vol. 19, No. 4, p: 35-49.
- Patten, D.M. (1991), Exposure Legitimacy, and Social Disclosure, *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 10, p: 297-308.
- Pattern, D.M. (1992), Intra-Industry Environmental Disclosure in Response to the Alaskan Oil Spill: a Note on Legitimacy Theory", *Accounting, Organization, and Society*, Vol. 17, No. 5, p: 471-475.
- Porwal, L.S. (1993), *Accounting Theory*, Tata McGraw-Hill Publishing, New Delhi.
- Preston, L.E. (1978), Analysing Corporate Social Performance: Method and Results, *Journal of Contemporary Business*, Vol. 7, No. 1, p: 135-150.
- Ramathan, K.V. (1976), Toward a Theory of Corporate Social Accounting, *The Accounting Review*, Vol. 51, No. 3, p: 516-528.
- Roberts, R.W. (1992), Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: an Application of Stakeholder Theory, *Accounting, Organization, and Society*, Vol. 17, No. 6, p: 595-612.

- Rockness, J. and Williams, P.F. (1988), A Descriptive Study of Social Accounting Responsibility Mutual funds", *Accounting, Organization, and Society*, Vol. 13, No. 4, p: 397-411.
- Shiraz, Abu, (1998), Social Reporting: Nice Idea, but... *Australian CPA (AAA)* Vol. 68, November, p: 58-59.
- Smith, C. and Warner, J. (1979), Financial Contracting: an Analysis of Bond Covenants, *Journal of Finance Economics*, Vol. 7, p: 117-162.
- Strand, R. (1993), A Systems Paradigm of Organizational Adaptations to the Social Environment, *Academy of Management Review*, Vol. 8, p: 90-96.
- Suchman, M.C. (1995), Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, *Academy of Management Review*, Vol. 20, p: 571-610.
- Swift, T., Owen, D. and Humphrey, C. (2001), Social Status, *Financial Management*, London, p: 17-18.
- Ullmann, A.A. (1985), Data in Search of a Theory: a Critical Examination of the Relationship among Social Performance, Social Disclosure, and Economic Performance of US Firm, *Academy of Management Review*, Vol. 10, p: 540-547.
- Wood, D.J. (1991), Corporate Social Performance Revisited, *Academy of Management Review*, Vol. 16, p: 691-718.
- Zadek, Simon, (1998), Balancing Performance, Ethics, and Accountability, *Journal of Business Ethics*, Vol. 17, October, p: 1421-1441.
- Zeghal, D. and Ahmed, S.A. (1990), Comparison of Social Responsibility Information Disclosure Media Used by Canadian Firms, *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Vol 3, No. 1, p: 38-53.

PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SOSIAL DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN GO PUBLIK DI BURSA EFEK JAKARTA

Florence Devina

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala

L Suryanto

Zulaikha

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

11

ABSTRAKSI

Perusahaan mulai menunjukkan perhatian terhadap lingkungan sosial. Akuntansi sebagai bagian dari dunia usaha dituntut untuk merespon perkembangan perusahaan tersebut. Peran akuntansi ditunjukkan dengan dimunculkannya akuntansi sosial. Melalui pengungkapan sosial, perusahaan dapat mengkomunikasikan aktivitas sosialnya serta memperoleh legitimasi dari para stakeholdersnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan: size perusahaan, tipe industri, profitabilitas dan basis perusahaan terhadap pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tema pengungkapan meliputi; tema lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan karyawan, karyawan (lain), produk, keterlibatan dalam masyarakat dan lainnya.

Sampel penelitian ini adalah 139 perusahaan go publik di BEJ yang menyampaikan laporan tahunan tahun 2002. Analisis data yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil penelitian menyatakan bahwa size perusahaan (total aktiva) dan tipe industri mempengaruhi pengungkapan sosial dalam laporan tahunan. Tetapi, penelitian ini tidak bisa membuktikan bahwa profitabilitas (ROA) dan basis perusahaan mempengaruhi pengungkapan sosial. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tema lingkungan, kesehatan dan keselamatan karyawan, karyawan (lain) dan keterlibatan dalam masyarakat secara signifikan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan: size perusahaan, tipe industri, profitabilitas dan basis perusahaan.

Kata Kunci : Pengungkapan Sosial, Total Aktiva, Tipe Industri, Return on Assets, Basis Perusahaan

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada dekade terakhir ini pertumbuhan kesadaran publik terhadap peran perusahaan di masyarakat semakin meningkat, hal ini dapat dilihat pada banyaknya perusahaan yang dianggap telah memberi kontribusi bagi kemajuan ekonomi dan teknologi tetapi perusahaan tersebut mendapat kritik karena telah menciptakan masalah sosial. Polusi, penyusutan sumber daya, limbah, mutu dan keamanan produk, hak dan status karyawan dan kekuatan dari perusahaan besar merupakan isu-isu yang menjadi perhatian saat ini terus meningkat (Gray et al, 1987 dalam Hackston dan Milne, 1996).

Pertumbuhan kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan mengakibatkan adanya kritik terhadap penggunaan laba sebagai satu-satunya alat ukur kinerja perusahaan. Sebagai respon, beberapa institusi akuntansi utama (*American Institute of Certified Public Accountants, National Association of Accountants*) mulai memikirkan akuntansi sosial perusahaan pada pertengahan tahun 1970 (Ramanathan, 1976 dalam Hackston dan Milne, 1996).

Tekanan dari berbagai pihak muncul khususnya *stakeholder* terhadap sektor swasta untuk menerima tanggung jawab dampak pengaruh aktivitas bisnis terhadap masyarakat. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada investor dan manajemen tetapi juga pada masyarakat yang lebih luas (Hackston dan Milne, 1996). Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Adapun salah satu jenis informasi pengungkapan sukarela adalah pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan. Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang *disclosure* adalah keputusan BAPEPAM No. Kep-38/PM/1996 (Nor Hadi dan Arifin Sabeni, 2002). Pengungkapan sukarela muncul karena adanya kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitar, keberhasilan perusahaan tidak hanya pada laba semata tetapi ditentukan juga kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar (Rahma Yuliani, 2003).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 1 (revisi 1998) paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

Dari pernyataan PSAK diatas, menunjukkan manifestasi akan kepedulian akuntansi akan masalah-masalah sosial yang merupakan pertanggung jawaban sosial perusahaan. Dengan adanya PSAK no. 1 tersebut diharapkan kesadaran perusahaan terhadap lingkungan bertambah.

Berbagai penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan keanekaragaman hasil. Seperti penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara *size* perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan oleh Belkaoui dan Karpik, 1989; Cooke T.E, 1992; Cowen, 1987; Hackston dan Milne, 1996 ; Yuniati Gunawan, 2000; Muhammad Rizal Hasibuan, 2001; dan Rahma Yuliani, 2003. Sedangkan Robert, 1992; Davey, 1982 dalam Hackston dan Milne (1996) dan Ng, 1985 dalam Hackston dan Milne (1996) tidak menemukan hubungan kedua variabel tersebut.

Dalam hubungan antara tipe industri dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terjadi ketidak konsistenan hasil penelitian. Hackston dan Milne, 1996 menemukan hubungan yang positif. Demikian juga Patten (1991) dan Robert (1992) dan Cowen *et al.*, (1987), Cooke (1992) dan Rahma Yuliani (2003). Muhammad Muslim Utomo (2000), Henny dan Murtanto (2001) dalam penelitiannya menemukan bahwa tipe industri *high profile* mengungkapkan lebih banyak dari tipe industri *low profile*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Davey (1982) dan Ng (1985) dalam Hackston dan Milne (1996) tidak menemukan hubungan antara kedua variabel tersebut.

Hubungan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan profitabilitas juga terjadi ketidak konsistenan hasil. Davey (1982) dalam Hackston dan Milne (1996), Ng (1985) dalam Hackston dan Milne (1996), Belkaoui dan Karpik (1989), Cowen *et al.*, (1987), Hackston dan Milne (1996), Muhammad Rizal

Hasibuan (2001) dan Rahma Yuliani (2003) menemukan tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut Hasil yang berlawanan ditemukan oleh Bowman dan Haire (1976), Preston (1978) dalam Hackston dan Milne (1996) yang menyatakan ada hubungan antara profitabilitas dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Secara lebih rinci, penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996) menguji pengaruh *size*, tipe industri dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada 50 perusahaan besar di Selandia Baru. Dia menemukan bahwa *size* dan tipe industri menjadi penduga yang signifikan bagi praktek pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Selandia Baru.

Di Indonesia, Muhammad Muslim Utomo (2000) melakukan penelitian pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan *high profile* dan *low profile* pada laporan tahunan 1998. Dia menemukan bahwa perusahaan *high profile* mempunyai pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dari perusahaan yang *low profile*

Henny dan Murtanto (2001) meneliti pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan *high profile* dan *low profile* dalam laporan tahunan 1999 dari 58 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasil yang sama dengan Muhammad Muslim Utomo (2000) ditemukan bahwa perusahaan *high profile* mempunyai pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dari perusahaan *low profile*.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Rizal Hasibuan (2001) menguji pengaruh berbagai karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan hanya besaran perusahaan dan *profile* yang berpengaruh signifikan terhadap praktek pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Muhammad Rizal Hasibuan (2001) juga menemukan bahwa perusahaan *high profile* mengungkapkan lebih banyak dari perusahaan *low profile*.

Rahma Yuliani (2003) menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan tipe industri terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam laporan tahunan 2001 dari 44 perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan yang diproksi dengan penjualan bersih dan tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996) yang meneliti hubungan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menggunakan variabel *size* perusahaan, tipe industri dan profitabilitas. Pada penelitian ini akan ditambah variabel basis perusahaan.

Basis perusahaan tersebut dimaksudkan sebagai tingkat kepemilikan saham, dimana dibedakan menjadi dua, yaitu berbasis asing dan domestik. Perusahaan yang proporsi kepemilikan saham sebagian besar dimiliki asing dikategorikan berbasis asing, sementara yang sebagian besar dimiliki domestik dikategorikan berbasis domestik. Variabel basis perusahaan telah diteliti oleh Nor Hadi dan Arifin Sabeni (2002) dengan hasil signifikan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan Bambang Suropto dan Zaki Baridwan (1999) yang menemukan bahwa basis perusahaan tidak signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela dan penelitian yang dilakukan Muhammad Rizal Hasibuan (2001) yang menemukan bahwa basis perusahaan tidak signifikan berpengaruh terhadap kuantitas pengungkapan sosial perusahaan.

Dari berbagai karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian terdahulu berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, penelitian ini akan menggunakan empat karakteristik, yaitu *size*, tipe industri, profitabilitas, basis perusahaan. Rumusan masalah yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah: Apakah karakteristik perusahaan yang diproksi dengan *size* perusahaan, tipe industri (*high profile/low profile*), profitabilitas dan basis perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sosial pada

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.

Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi item pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sosial perusahaan, menguji secara empirik pengaruh *size* perusahaan, tipe industri, profitabilitas dan basis perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan di Indonesia.

Adapun manfaat yang diharapkan adalah dapat memberikan kontribusi pengembangan pengungkapan sukarela khususnya pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan, memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan praktek pengungkapan sosial perusahaan dalam laporan tahunan, dapat mengklarifikasi hasil penelitian sebelumnya, dan untuk penelitian berikutnya kekurangan dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan kesempurnaan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan sosial perusahaan di Bursa Efek Jakarta.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut juga sebagai *corporate social responsibility* (Hackston dan Milne, 1996) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Banyak teori yang menjelaskan mengapa perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Gray *et. al.*, (1995b) menyebutkan ada tiga studi, yaitu :

1. *Decision usefulness studies*. Sebagian dari studi-studi yang dilakukan oleh para peneliti yang mengemukakan teori ini menemukan bukti bahwa informasi sosial dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Para analis, banker dan pihak lain yang dilibatkan dalam penelitian tersebut diminta untuk melakukan pemeringkatan terhadap informasi akuntansi. Informasi akuntansi tersebut tidak terbatas pada informasi akuntansi tradisional yang telah dikenal selama ini, namun juga informasi yang lain yang relatif baru dalam wacana akuntansi. Mereka menempatkan informasi aktivitas sosial perusahaan pada posisi yang *moderately important*.

2. *Economic theory studies*. Studi disini menggunakan *agency theory* dimana menganalogikan manajemen sebagai agen dari suatu prinsipal. Lazimnya, prinsipal diartikan sebagai pemegang saham atau *traditional users* lain. Namun, pengertian prinsipal tersebut meluas menjadi seluruh *interest group* perusahaan yang bersangkutan. Sebagai agen, manajemen akan berupaya mengoperasikan perusahaan sesuai dengan keinginan publik.

3. *Social and political theory studies*. Studi dibidang ini menggunakan teori *stakeholders*, teori legitimasi organisasi dan teori ekonomi politik.

Teori *stakeholders* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholders*. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para *stakeholder* dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi *stakeholders*, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para *stakeholders*-nya.

Teori legitimasi seperti yang dinyatakan Lindblom (1994) dalam Gray *et. al.*, (1995b) adalah sebagai berikut :

"...Suatu kondisi atau status, yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan, kongruen dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya. Ketika suatu perbedaan, yang nyata atau potensial, ada antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan"

Sedangkan teori ekonomi politik menurut Jackson (1982) dalam Gray *et al.*, (1995b) adalah sebagai berikut :

"Political economy is the study of the interplay of power, the goals of power wielders and the productive exchange system (Zald, 1970). As a framework, political economy does not concentrate exclusively on market exchanges. Rather it first of all analyses exchanges in whatever institutional framework they occur and second, analyses the relationships between social institutions such as government, law and property rights, each fortified by power and the economy i.e the system of producing and exchanging goods and services."

Berdasar teori ini pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan sebagai reaksi terhadap tekanan-tekanan dari lingkungannya agar perusahaan merasa eksistensi dan aktivitasnya terlegitimasi.

2.2 Size Perusahaan

Size perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil. Alasan lainnya adalah bahwa perusahaan besar mempunyai biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Lebih banyak pemegang saham juga memerlukan lebih banyak pengungkapan karena tuntutan para pemegang saham tersebut dan para analis pasar modal (Yuniati Gunawan, 2000). Cowen *et. al* (1987) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar terhadap masyarakat akan memiliki pemegang saham yang mungkin memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan dan laporan tahunan akan digunakan untuk menyebarkan informasi tentang tanggung jawab sosial tersebut.

Akan tetapi, tidak semua penelitian mendukung hubungan antara *size* perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang tidak berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel ini ditemukan oleh Robert (1992) dan seperti yang disebutkan dalam Hackston dan Milne (1996) antara lain Davey (1982) dan Ng (1985). Sedangkan penelitian yang berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel ini antara lain Nor Hadi dan Arifin Sabeni, 2002; Yuniati Gunawan, 2000; Bambang Supto dan Zaki Baridwan, 1999; Muhammad Rizal Hasibuan, 2001; Rahma Yuliani, 2003; Cooke T.E, 1992; Belkaoui dan Karpik, 1989, dan Hackston dan Milne, 1996. Karena ketidak konsistenan hasil maka penelitian ini menguji pengaruh *size* perusahaan terhadap pengungkapan sosial dalam laporan tahunan di BEJ.

2.3 Tipe Industri

Tipe industri telah diidentifikasi sebagai faktor potensial yang mempengaruhi praktek pengungkapan sosial perusahaan. Robert (1992) mendefinisikan industri *high profile* sebagai industri yang memiliki visibilitas konsumen, resiko politik yang tinggi, atau kompetisi yang tinggi. Robert (1992) menyatakan bahwa penelitian terdahulu yang mencakup industri telah terdapat suatu hubungan sistematis antara karakteristik-karakteristik tersebut dengan aktivitas pertanggung jawaban sosial. Tentu saja, semua

klasifikasi itu merupakan hal yang subyektif. Robert (1992) memasukkan industri automobil, penerbangan, dan minyak sebagai *high profile*.

Cowen *et. al* (1987) menyatakan bahwa perusahaan yang berorientasi pada konsumen akan lebih memperhatikan pertanggung jawaban sosialnya kepada masyarakat karena hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan mempengaruhi tingkat penjualan. Patten (1991) mengidentifikasi industri minyak, kimia, hutan dan kertas sebagai *high profile* untuk satu penelitian. Dierkes dan Preston (1977) dalam Hackston dan Milne (1996) menyatakan bahwa perusahaan yang kegiatan ekonominya mempengaruhi lingkungan, seperti industri *extractive* akan lebih suka mengungkapkan informasi tentang pengaruh terhadap lingkungan mereka dibandingkan dengan perusahaan di Industri lain.

Di Indonesia, Muhammad Rizal Hasibuan (2001), Muhammad Muslim Utomo (2000) maupun Henny dan Murtanto (2001) memasukkan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), *engineering*, kesehatan, transportasi, dan pariwisata sebagai perusahaan yang *high profile*. Sedangkan bangunan, keuangan dan perbankan, suplier peralatan medis, properti, retailer, tekstil dan produk tekstil, produk personal, produk rumah tangga sebagai perusahaan yang *low profile*.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan definisi diatas, penelitian ini akan memasukkan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), *engineering*, kesehatan, transportasi, dan pariwisata dalam kategori perusahaan yang *high profile*. Sedangkan bangunan, keuangan dan perbankan, suplier peralatan medis, properti, retailer, tekstil dan produk tekstil, produk personal, produk rumah tangga sebagai perusahaan yang *low profile*.

Penelitian berkaitan dengan pengungkapan sosial yang dilakukan pada perusahaan *high profile* dan *low profile* di Selandia Baru menunjukkan bahwa perusahaan *high profile* lebih tinggi daripada pengungkapan sosial yang dilakukan pada perusahaan *low profile* (Hackston dan Milne, 1996). Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Muhammad Rizal Hasibuan, 2001; Rahma Yuliani, 2003; Muhammad Muslim Utomo, 2000 dan Cooke T.E, 1992. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Davey (1992) dan Ng (1995) dalam Hackston dan Milne (1996) tidak menemukan hubungan antara kedua variabel tersebut. Penelitian ini akan mencoba menguji kembali pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan sosial dalam laporan tahunan di BEJ.

2.4 Profitabilitas

Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas perusahaan telah menjadi postulat untuk mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya managerial yang sama dengan gaya manajerial yang diperlukan untuk membuat suatu perusahaan memperoleh keuntungan (Bowman dan Haire, 1976 dalam Hackston dan Milne, 1996). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mencerminkan suatu pendekatan manajemen adaptif dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dan multidimensional serta kemampuan untuk mempertemukan tekanan sosial dengan reaksi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, ketrampilan manajemen perlu dipertimbangkan untuk *survive* dalam lingkungan perusahaan masa kini (Cowen *et. al*. 1987). Heinze (1976) dalam Gray *et.al.*, (1995b) menyatakan bahwa profitabilitas adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program tanggung jawab sosial secara lebih luas.

Riset penelitian empiris terhadap hubungan pengungkapan sosial perusahaan, profitabilitas menghasilkan hasil yang sangat beragam. Penelitian Bowman dan Haire (1976) serta Preston (1978) dalam Hackston dan Milne (1996) mendukung hubungan profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Bowman dan Haire (1976) dalam Hackston dan Milne (1996) melaporkan perbedaan yang signifikan untuk rata-rata ROE selama 5 tahun antara perusahaan yang mengungkapkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan. Penelitian Preston (1978) dalam Hackston dan Milne (1996) melaporkan ROE satu tahun yang lebih tinggi untuk perusahaan yang lebih mengungkapkan dibandingkan perusahaan lain yang termasuk Fortune 500. Penelitian Hackston dan Milne (1996) melaporkan bahwa profitabilitas tidak signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian Belkaoui dan Karpik (1989) untuk hubungan pengungkapan sosial perusahaan dan profitabilitas yang diukur dengan ROA bertentangan dan sulit untuk diinterpretasikan. Sedangkan penelitian di Indonesia dilakukan oleh Rahma Yuliani (2003) dengan hasil bahwa profitabilitas tidak signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan.

Karena ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini menguji kembali pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan sosial perusahaan dalam laporan tahunan di BEJ.

2.5 Basis Perusahaan

Basis perusahaan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai tingkat kepemilikan saham, dimana dibedakan menjadi dua yaitu berbasis asing dan domestik. Perusahaan yang proporsi kepemilikan saham sebagian besar dimiliki asing dikategorikan berbasis asing, sementara yang sebagian besar dimiliki domestik dikategorikan berbasis domestik.

Terdapat beberapa alasan perusahaan berbasis asing memberikan pengungkapan yang lebih dibandingkan perusahaan domestik (Susanto, 1992 dalam Muhammad Rizal Hasibuan, 2001). Pertama perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri, kedua perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk, ketiga kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum.

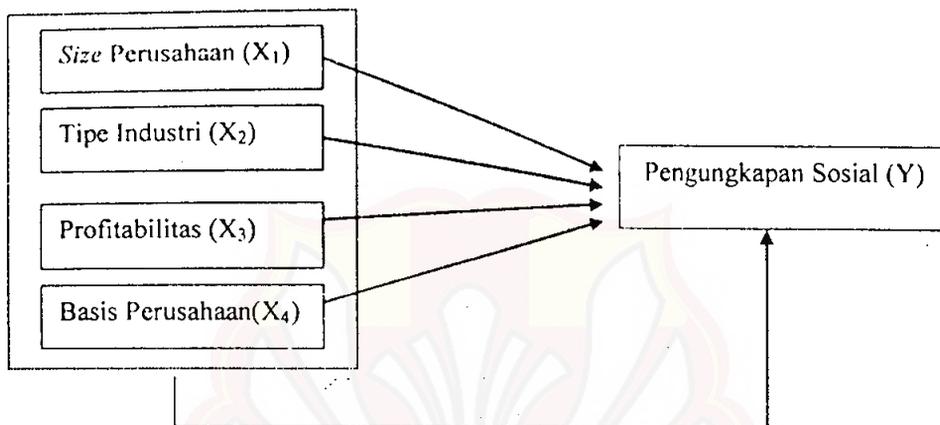
Penelitian yang dilakukan oleh Nor Hadi dan Arifin Sabeni (2002) menunjukkan hasil yang signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Hal ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan Suropto (1999) dan Muhammad Rizal Hasibuan (2001) yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena ketidakkonsistenan ini maka peneliti mencoba untuk meneliti kembali variabel ini. Adapun penelitian ini menguji pengaruh basis perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan dalam laporan tahunan di BEJ.

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Luas pengungkapan dengan tidak melakukan pembobotan didasarkan pada alasan bahwa untuk menghindari munculnya subyektifitas pembobot. Chow dan Wong- Boren, 1987 dalam Nor Hadi dan Arifin Sabeni (2002), membuktikan lewat penelitiannya, dimana luas pengungkapan dengan pembobotan dan tanpa pembobotan ternyata hasilnya tidak berbeda (identik).

Dari uraian teoritis maka dapat digambarkan suatu model teoritis sebagai berikut :

Gambar 1
 Pengungkapan Sosial (Y)



Tipe Industri (X_2)
 Size Perusahaan (X_1)
 Kerangka Pikir Teoritis

2.7 Hipotesis

Dari kerangka pikir teoritis diatas maka hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Hipotesis 1

Size perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial perusahaan

Hipotesis 2

Tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial perusahaan

Hipotesis 3

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial perusahaan

Hipotesis 4

Basis perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial perusahaan

Hipotesis 5

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari perusahaan di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2002. Data yang digunakan adalah laporan tahunan 2002 yang dipublikasikan pada awal 2003. Alasan dipilihnya periode waktu tersebut karena laporan tahunan 2002 merupakan data terbaru yang bisa diperoleh peneliti di situs BEJ yaitu www.jsx.co.id

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2002. Jumlah populasi pada tahun 2002 sebanyak 323 perusahaan. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan adalah perusahaan yang melakukan pengungkapan sosial pada tahun 2002. Pada penelitian ini *check list* (*check list* ada pada lampiran) digunakan untuk melihat pengungkapan sosial perusahaan. Berdasarkan metode dan kriteria pengambilan sampel diatas didapat 139 perusahaan yang melakukan pengungkapan sosial.

3.3 Prosedur dan Pengumpulan Data

Data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta pada tahun 2002. Penggunaan data *cross sectional* ini karena pada penelitian ini menguji faktor-faktor intern perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam industri yang berbeda pada waktu yang sama. Data tersebut diperoleh dari situs BEJ yaitu www.jsx.co.id.

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Pengungkapan Sosial

Pengungkapan sosial adalah data yang diungkapkan perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan yang meliputi tema sebagai berikut : lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan karyawan, lain-lain tentang karyawan, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. (Hackston dan Milne, 1996).

Content analysis digunakan untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. *Content analysis* adalah suatu metoda pengkodifikasian teks dari ciri yang sama untuk ditulis ke dalam berbagai kelompok (atau kategori) tergantung pada kriteria yang ditentukan (Weber, 1988 dalam Hackston dan Milne, 1996).

Check list dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup dimensi dari tema lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan karyawan, lain-lain tentang karyawan, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. Dalam pengukuran pengungkapan digunakan skor 1 jika mengungkapkan dan 0 jika tidak mengungkapkan untuk setiap item pengungkapan yang selanjutnya akan dijumlahkan. Pengukuran ini dilakukan antara lain oleh Cooke (1992), Hackston dan Milne (1996), Bambang Suropto dan Zaki Baridwan (1999).

3.4.2 Size Perusahaan

Penelitian terdahulu, *size* perusahaan telah diukur dengan jumlah karyawan, nilai total asset, volume penjualan, atau ranking indeks, log penjualan bersih, kapitalisasi pasar.

Pada penelitian ini total aktiva sebagai ukuran untuk *size* perusahaan. Penggunaan log total aktiva ini untuk menyamakan nilai dengan variabel lain dikarenakan total aktiva perusahaan nilainya relatif besar dibanding variabel-variabel lain dalam penelitian ini.

3.4.3 Tipe Industri

Berdasar penelitian-penelitian sebelumnya, perusahaan yang terklasifikasi dalam kelompok industri *high profile* antara lain perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), *enineering*, kesehatan, transportasi, dan pariwisata. Sedangkan bangunan, keuangan dan perbankan, suplier peralatan

medis, properti, retailer, tekstil dan produk tekstil, produk personal, produk rumah tangga sebagai perusahaan yang *low profile*.

Tipe industri ini diukur dengan menggunakan variabel dummy dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan *high profile* dan nilai 0 untuk perusahaan *low profile*.

3.4.4 Profitabilitas

Hackston dan Milne (1996) maupun Belkaoui dan Karpik (1989) dalam penelitiannya menggunakan *return on assets*. Konsisten dengan penelitian terdahulu, variabel profitabilitas diukur dengan menggunakan *return on assets*. Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Earning before interest and tax}}{\text{Total assets}}$$

3.4.5 Basis Perusahaan

Pengukuran untuk basis perusahaan menggunakan variabel dummy 0 dan 1. Perusahaan berbasis asing diberi nilai 1, dan nilai 0 diberikan untuk perusahaan berbasis domestik.

3.5 Model Penelitian

Adapun model regresi ini ditunjukkan dalam persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y	=	Jumlah pengungkapan sosial perusahaan
Size perusahaan (X_1)	=	Logaritma natural dari total aktiva
Tipe industri (X_2)	=	dummy untuk mengklasifikasikan; industri <i>high profile</i> (1) dan <i>low profile</i> (0)
Profitabilitas (X_3)	=	Rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total assets (ROA)
Basis perusahaan (X_4)	=	dummy untuk mengklasifikasikan; Asing=1, Domestik=0
e	=	error
a	=	konstanta

4. HASIL dan PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Uji Kualitas Data

Untuk pengujian normalitas data, dilakukan dengan menggunakan uji Kormogorov-Smirnov. Dari pengujian tersebut terlihat bahwa data terdistribusi dengan normal.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mendukung kebenaran interpretasi hasil analisis dengan model regresi maka dilakukan uji asumsi klasik berupa uji multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini nilai *tolerance* dan *variance inflaction faktor* (VIF) digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Dari hasil perhitungan output regresi untuk variabel Lnsiz, tipe industri, ROA dan basis perusahaan terlihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1
Nilai VIF (*Variance Inflaction Faktor*) dan *Tolerance*

Variabel	Tolerance	VIF
Lnsiz	0,971	1,030
Tipe Industri	0,866	1,155
ROA	0,807	1,240
Basis Perusahaan	0,903	1,108

Sumber : hasil output regresi

Dilihat dari nilai yang terdapat dalam tabel 1, tampak bahwa nilai *tolerance* kurang dari 1 yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan pada kolom VIF juga menunjukkan hal yang sama, yakni tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa keempat variabel bebas tidak mengandung multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Park. Adapun hasil uji Park seperti ditampilkan pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-1.301	3.273		-.398	.692
	LNSIZE	.146	.119	.105	1.220	.225
	TIPE	9.266E-02	.451	.019	.206	.837
	ROA	2.066	2.166	.090	.954	.342
	BASIS	.515	.642	.072	.803	.423

a. Dependent Variable: LNU21

Dari tabel 2, tampak bahwa pada kolom sig. untuk semua variabel adalah diatas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai probabilitas lebih besar dari 0,05, artinya model regresi tidak terdapat heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu. Sampel pada penelitian ini diatas 100 sehingga pengujian terhadap autokorelasi pada penelitian ini dideteksi dengan uji *Breusch-Godfrey* (Imam Gozali, 2001). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa besarnya *Breusch-Godfrey* dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.572	12.024		.048	.962
	LNSIZE	-2.08E-02	.439	-.004	-.047	.962
	TIPE	8.130E-02	1.660	.005	.049	.961
	ROA	9.895E-02	7.993	.001	.012	.990
	BASIS	-6.56E-02	2.356	-.003	-.028	.978
	RES_3	-1.38E-02	.088	-.014	-.158	.875

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Dari tabel 3 tampak bahwa pada kolom sig. untuk semua variabel adalah diatas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai probabilitas lebih dari 0,05, artinya model regresi tidak terdapat autokorelasi.

4.1.3 Pengujian Hipotesis

Hipotesis 1, 2, 3, 4 dan 5 bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel *size*, tipe industri, ROA dan basis perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Variabel total aktiva memiliki deviasi yang besar sehingga mengakibatkan data tidak normal dan memiliki koefisien yang signifikan dalam pengujian heterokedastisitas, oleh karena itu perlu ditransformasikan ke dalam model regresi ln (Gujarati, 1995).

Adapun model regresi ini ditunjukkan dengan persamaan :

$$Y = a + b_1 \ln X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Koefisien b_i mengukur elastisitas variabel Y yang disebabkan karena perubahan variabel X_i , begitu pula untuk X_2 , X_3 dan X_4 . Hubungan antara variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 dengan Y ditentukan oleh tanda (+ atau -) dari koefisien (b) dari masing-masing variabel.

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji-statistiknya berada dalam daerah kritis (menolak H_0) dan sebaliknya tidak signifikan bila nilai uji statistik berada dalam daerah yang menerima H_0 (Imam Gozali, 2000).

Untuk menguji adanya pengaruh yang signifikan atau tidak antara variabel dependen dan independen peneliti menggunakan uji statistik t. Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara *Lnsiz*e, tipe industri, ROA dan basis perusahaan secara bersama-sama terhadap

pengungkapan sosial perusahaan. Koefisien determinasi (R Square) adalah suatu unit nilai yang menunjukkan besarnya perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh variabel lainnya. R Square digunakan untuk mengetahui seberapa besar (dalam %) sumbangan faktor *lnsize*, tipe industri, ROA dan basis perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sosial perusahaan. Hasil uji t, uji F, dan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Regresi

	Koefisien	T	Sig.	Keterangan
<i>lnsize</i>	0,331	4,215	0,000	Signifikan
Tipe Industri	0,169	2,026	0,045	Signifikan
ROA	0,143	1,663	0,099	Tidak Signifikan
Basis Perusahaan	0,094	1,155	0,250	Tidak Signifikan
F			0.000	
R ²	0,196			
R ² Adjusted	0,172			

Sumber : Hasil output regresi

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui pada persamaan regresi, terlihat bahwa variabel *lnsize* memiliki tingkat signifikansi $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *lnsize* secara parsial berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Semakin besar total aktiva suatu perusahaan maka perusahaan itu akan melaporkan pengungkapan sosial yang lebih banyak. Hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama.

Untuk mendapat legitimasi, perusahaan besar akan melakukan aktivitas sosial lebih banyak agar mempunyai pengaruh terhadap pihak-pihak internal maupun eksternal yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan dapat bertahan apabila masyarakat disekitar perusahaan merasa bahwa perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya sesuai dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat (Gray *et al.*, 1996 dalam Rahma Yuliani, 2003). Selain itu, perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Cowen *et al.* (1987), secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat oleh perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Hasil ini juga sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa perusahaan besar mempunyai biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Kelly (1981) dalam Hackston dan Milne (1996), Patten (1991) di Amerika Serikat dan Hackston dan Milne (1996) di Selandia Baru yang menemukan bahwa *size* perusahaan berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan sosial perusahaan.

Berdasarkan tabel 4, juga dapat diketahui bahwa variabel tipe industri memiliki tingkat signifikansi < 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa tipe industri berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Industri *high profile* cenderung melaporkan lebih banyak pengungkapan sosial dibandingkan dengan industri *low profile*. Dengan demikian penelitian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan tipe industri mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Hasil penelitian sesuai dengan teori legitimasi bahwa industri *high profile* lebih banyak melakukan pengungkapan sosial karena aktivitas industri *high profile* lebih banyak berhubungan dengan lingkungan, masyarakat dan dibatasi oleh hukum. Dengan memberikan lebih banyak pengungkapan sosial maka aktivitas perusahaan akan mendapat legitimasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa semakin kuat posisi *stakeholder*, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para *stakeholder*-nya. Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi dan teori *stakeholder*.

Hal ini sesuai dengan penelitian Patten (1991) dan Hackston dan Milne (1996), Muhammad Rizal Hasibuan (2001) dan Rahma Yuliani (2003) yang menemukan bahwa tipe industri mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Muhammad Muslim Utomo (2000), Henny dan Murtanto (2001) menyatakan industri *high profile* lebih banyak mengungkapkan pengungkapan sosial dibanding industri *low profile*.

Dari tabel 4, dapat diketahui bahwa pada persamaan regresi, terlihat bahwa variabel ROA memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel ROA secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial perusahaan. ROA menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan, dengan demikian tingkat profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap besar pengungkapan sosial perusahaan. Hasil penelitian ini tidak berhasil menerima hipotesis ketiga. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi belum tentu lebih banyak melakukan aktivitas sosial karena perusahaan lebih berorientasi pada laba semata. Penelitian Belkaoui dan Karpik (1989), Cowen *et. al* (1987), Patten (1991), dan Hackston dan Milne (1996). Sedangkan di Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Rizal Hasibuan (2001) dan Rahma Yuliani (2003). Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang menyatakan bahwa dengan adanya laba yang tinggi maka manajemen akan melakukan pengungkapan sosial yang luas.

Untuk variabel basis perusahaan tidak ditemukan adanya pengaruh antara pengungkapan sosial dengan basis perusahaan. Hal ini konsisten dengan temuan Bambang Suropto dan Zaki Baridwan (1999) dan Muhammad Rizal Hasibuan (2001), namun tidak konsisten dengan Nor Hadi dan Arifin Sabeni (2002) yang menemukan signifikan pada pengungkapan sukarela. Temuan penelitian ini tidak menemukan bukti empiris atas teori yang memprediksi perusahaan berbasis asing akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi dari perusahaan domestik. Hal ini mungkin dikarenakan sedikitnya perusahaan asing yang ada di Indonesia dan perusahaan-perusahaan tersebut sebagian besar dari Jepang yang mempunyai budaya keterbukaan informasi lebih rendah dari negara lainnya (Choi dan Mueller, 1992 dalam Muhammad Rizal Hasibuan, 2001).

Secara keseluruhan *Lnsize*, tipe industri, ROA dan basis perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap tingkat pengungkapan sosial perusahaan dengan alpha 5%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan persentase tingkat pengungkapan sosial perusahaan dapat dijelaskan oleh perubahan yang terjadi pada seluruh *Lnsize*, tipe industri, ROA dan basis perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini cukup baik digunakan untuk melihat pengaruh *Lnsize*, tipe industri, ROA dan basis perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Dengan demikian hipotesis

kelima dapat diterima.

Hasil uji secara simultan pada tema-tema pengungkapan sosial menunjukkan bahwa tema lingkungan, kesehatan dan keselamatan karyawan, karyawan (lain) dan keterlibatan dalam masyarakat signifikan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan : size perusahaan, tipe industri, profitabilitas dan basis perusahaan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996) dan juga penelitian yang dilakukan di USA, UK, Australia dan Selandia Baru yang menemukan signifikan pada tema lingkungan, ketenagakerjaan dan keterlibatan dalam masyarakat (Hackston dan Milne, 1996). Sedangkan untuk tema energi, produk dan lainnya tidak signifikan.

5. KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh *size* perusahaan, tipe industri, profitabilitas dan basis perusahaan terhadap luas pengungkapan sosial perusahaan dalam laporan tahunan. Ada beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pengujian secara simultan menemukan adanya pengaruh signifikan antara karakteristik perusahaan dengan *size* perusahaan, tipe industri, profitabilitas dan basis perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan.
2. Variabel *size* perusahaan yang diproksi dengan total aktiva berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Sedangkan profitabilitas dan basis perusahaan tidak berpengaruh.
3. Tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Industri *high profile* ternyata lebih banyak melakukan pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan.
4. Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini hanya mempengaruhi pengungkapan sosial pada tema lingkungan, kesehatan dan keselamatan karyawan, karyawan (lain) dan keterlibatan dalam masyarakat. Sementara untuk tema energi, produk dan lainnya tidak signifikan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dalam *size* perusahaan, tipe industri, profitabilitas dan basis perusahaan.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

Pengungkapan sosial terbatas pada perusahaan yang mempunyai karakteristik tertentu seperti *size* perusahaan yang besar dan industri *high profile* lebih banyak mengungkapkan pengungkapan sosial dalam laporan tahunan.

Size perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan menunjukkan bahwa semakin besar *size* perusahaan diikuti dengan makin luasnya pengungkapan. Hal ini mengisyaratkan bahwa *size* perusahaan yang besar mempunyai tanggung jawab tentang pengungkapan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sehingga semakin besar *size* perusahaan tidak diikuti dengan makin luasnya pengungkapan sosial maka perusahaan tersebut diindikasikan mempunyai permasalahan misalnya memanipulasi dalam pencatatan total aktiva

Tipe industri juga berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan. Ini menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan yang *high profile* akan berupaya untuk memperluas lingkup pengungkapan sosial. Harapan dari masyarakat yaitu perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya juga memperhatikan lingkungan. Sehingga dimungkinkan juga muncul peraturan pemerintah mengenai undang-

undang yang mengatur aktivitas perusahaan agar tetap memperhatikan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, yang akan terlihat pada pengungkapan sosial dalam laporan tahunan, dengan kata lain pengungkapan sukarela diwajibkan bagi industri *high profile* yang aktivitas perusahaannya banyak berhubungan dengan lingkungan dan berikutnya industri *low profile*. Hal ini dapat dilihat adanya kesadaran perusahaan untuk mengungkapkan yang berkaitan dengan tema lingkungan, kesehatan dan keselamatan karyawan, karyawan (lain) dan keterlibatan dalam masyarakat.

Informasi yang seluas-luasnya mengenai pengungkapan sosial menunjukkan keterbukaan pihak manajemen terhadap pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Periode penelitian ini hanya satu tahun, yakni tahun 2002, sehingga konsistensi hasil penelitian antar tahun tidak dapat diketahui.
2. Penyusunan daftar pengungkapan sosial cenderung bersifat subyektif dan memungkinkan terlewatnya item-item tertentu yang seharusnya diungkap oleh perusahaan.
3. Subyektifitas dalam menempatkan perusahaan pada kategori *high profile* dan *low profile* dan dalam pengukuran pengungkapan sosial tidak dapat dihindari kemungkinan biasnya pengukuran pengungkapan sosial.

5.4 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian yang akan datang antara lain :

1. Periode penelitian ditambah hal ini akan berpengaruh terhadap konsistensi pengujian hipotesis.
2. Menyempurnakan dan memperbaharui daftar pengungkapan sosial yang digunakan sebagai instrumen penelitian sesuai dengan kondisi pada saat penelitian dilakukan.
3. Mencari alasan perusahaan melakukan pengungkapan sosial (bila mengungkap) dan alasan perusahaan tidak melakukan pengungkapan sosial (bila tidak mengungkap).

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Supto dan Zaki Baridwan. 1999. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan". *Simposium Nasional Akuntansi II*. September. 1999.
- Belkaoui, A and Karpik, P.G. 1989. "Determinant of the corporate decision to disclose social information". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 2 No. 1. pp. 36-51.
- Cook, T.E. 1989. "Disclosure in the Corporate Annual Report of the Swedean Companies". *Accounting and Business Research* 19: 113-124.
- Cowen, S.S., Ferreri, L.B. dan Parker, L.D. 1987. "The impact of corporate characteristics on social responsibility disclosure: a typology and frequency-based analysis". *Accounting, Organizations and Society*. Vol. 12 No. 2. pp.111-122.
- Gray, R., Kouhy, R. and Lavers, S. 1995a. "Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8 No. 2. pp. 47-77.
- _____. 1995b. "Methodological themes: constructing a research database of social and environmental reporting by UK companies". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8 No. 2. pp. 78-101.
- Gujarati, Damodar N., 1995. *Basic Econometric*. Third Edition. Mc. Graw-Hill.
- Hackston, D and Milne, MJ., 1996. "Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand Companies". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 9 No. 1. pp. 77-108.
- Henny dan Murtanto. 2001. "Analisis pengungkapan sosial pada laporan tahunan". *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*: Vol. 1 No. 2. pp. 21-48.
- [http:// www.jsx.co.id](http://www.jsx.co.id)
- Imam Ghozali. 2001. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS". *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Muhammad Muslim Utomo. 2000. *Praktek Pengungkapan Sosial Pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia*. *Simposium Nasional Akuntansi III*.
- Muhammad Rizal Hasibuan. 2001. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Tahunan Emiten di BEJ dan BES*. Tesis Program Magister Undip (tidak dipublikasikan).
- Nor Hâdi dan Arifin Sabeni. 2002. "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Jakarta". *Jurnal Maksi*. Vol 1. Agustus 2002.
- Patten, Dennis M. 1991. "Exposure, legitimacy and social disclosure". *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 10 No. 4. pp. 297-308.
- Rahma Yuliani. 2003. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktek Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Di Indonesia*. Tesis Program Magister Undip (tidak dipublikasikan).
- Robert, Robin W. 1992. "Determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholder theory". *Accounting, Organizations and Society*. Vol. 17 No. 6. pp. 595-612.
- SAK Revisi 1998, "Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan". Paragraf 9. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sofyan Safri Harahap. 1993. *Teori Akuntansi*. Edisi Kesatu. PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Yuniati Gunawan. 2000. "Analisa Pengaruh Informasi Tahunan pada Perusahaan yang Terdaftar Dibursa Efek Jakarta". *Simposium Nasional Akuntansi III*.

Penelitian tentang Pengungkapan Akuntansi Sosial Lingkungan oleh Perusahaan

Theresia Dwi Hastuti
Stefani Lily Indarto

Abstrak

Dalam abad 21, dunia akan menghadapi tuntutan tentang perlunya audit atas kesehatan lingkungan. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi manajer. Selam ini perusahaan memberikan keuntungan kepada masyarakat dalam bentuk pekerjaan, bantuan –bantuan lainnya, dan pajak kepada pemerintah. Tetapi saat ini hal tersebut dirasa belum cukup oleh masyarakat. Mereka juga membutuhkan jaminan lingkungan yang sehat yang tidak dicemari oleh limbah- pabrik. Tuntutan masyarakat terhadap perusahaan ini, akan meningkatkan kebutuhan perusahaan akan berperannya auditor lingkungan untuk dapat memberikan bantuan untuk mengaudit perusahaannya dalam hal kesehatan proses produksi yang ramah lingkungan, penyajian dalam laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) meneliti tentang pengungkapan akuntansi lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan. (2). Meneliti tentang tingkat keterlibatan akuntansi dan akuntan dalam pengungkapan akuntansi lingkungan. Hasil penelitian ini adalah : (1) terdapat 53% responden menyatakan bahwa perusahaannya telah mengungkapkan kegiatan pengamanan lingkungan dari aktivitas pabriknya, baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan statistik. (2) peran akuntan dan akuntansi dalam pengungkapan akuntansi lingkungan antara lain dalam hal pengungkapan energi dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan pemerintah atas lingkungan. (3) Keterlibatan akuntan di perusahaan dalam hal pengungkapan akuntansi lingkungan banyak yang belum secara intensif meskipun akuntan menyadari bahwa perannya dalam pengungkapan lingkungan dan akuntansi lingkungan sangat penting.

Kata Kunci; *environmental disclosure and environmental accounting*

Perubahan lingkungan yang terjadi di masyarakat mempengaruhi pola pikir dan sikap masyarakat dalam menghadapi setiap kejadian atau peristiwa yang menyangkut kegiatan perekonomian. Namun demikian, para pelaku bisnis sering tidak mempertimbangkan dampak sosial yang dapat ditimbulkan oleh pengolahan bahan baku yang berasal dari sumber alam terhadap lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh: polusi udara, polusi air, polusi suara, limbah sungai dan

laut, serta pembuangan sampah pabrik yang merugikan lingkungan hidup di sekitar perusahaan dan masyarakat pada umumnya. Kondisi ini menyadarkan masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara aktivitas masyarakat bisnis modern dengan kepentingan lingkungan sekitarnya.

Pada abad 21, dunia akan menghadapi kecenderungan dan tuntutan lingkungan global dan disinyalir akan menjadi tantangan serius bagi para manajer profesional. Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Perusahaan memberi-

kan kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk dikonsumsi, membayar pajak, dan memberikan sumbangan. Namun belakangan ini semakin disadari dan dikeluhkan oleh masyarakat tentang dampak lingkungan dari operasional perusahaan dan dari proses modernisasi yang cukup besar dan sulit dikendalikan seperti misalnya polusi, keracunan, kebisingan, pemaksaan, dan masih banyak lagi. Dampak semacam ini sering disebut sebagai *externalities* dari modernisasi.

Masyarakat menginginkan agar dampak ini dikontrol sehingga dampak negatif *external diseconomy* atau social

yang ditimbulkannya tidak semakin besar. Dengan adanya tuntutan ini, akuntansi bukan hanya merangkum informasi tentang hubungan perusahaan dengan pihak ketiga tetapi juga dengan lingkungannya. Fenomena pencatatan akuntansi mulai mengekspos tentang proses degradasi lingkungan yang dilakukan oleh dunia bisnis (Gray, 1990). Peran akuntansi dalam keperdulian terhadap lingkungan adalah membantu bisnis yang berorientasi terhadap lingkungan dapat mengetahui tingkat/kadar pemanfaatan lingkungan dari hasil laporan keuangan yang mengakomodasi pelaporan tentang pemanfaatan lingkungan. Bantuan yang terbesar dapat dilakukan melalui kebijakan dan tindakan-tindakan serta aturan-aturan yang dihasilkan dari perilaku akuntan yang peduli terhadap lingkungan bisnis di organisasi dimana dia berada. Masalah-masalah yang menjadi perhatian lingkungan sosial antara lain, masalah-masalah polusi udara dan pencemaran lingkungan yang semakin meningkat dan sulit dicegah, semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan demografi, adanya kecenderungan untuk meningkatkan upaya-upaya mempercepat industrialisasi ekonomi sehingga menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan dan aspek-aspek pembangunan lainnya, serta konflik-konflik lingkungan yang semakin meningkat sebagai akibat terjadinya degradasi lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perilaku akuntan dan sensitivitasnya terhadap akuntansi sosial lingkungan di kabupaten dan kota Semarang. Kabupaten Semarang menjadi pilihan peneliti karena banyak limbah yang belum ditangani secara baik. Terdapat pula lingkungan kumuh disekitar pabrik-pabrik pembuangan bau yang sangat mengganggu. Sementara peneliti juga menyadari pentingnya masalah akuntansi sosial lingkungan merupakan salah satu materi yang menjadi kajian akuntan. Hal ini menjadi dasar pemikiran yang memunculkan gagasan untuk melakukan penelitian ini.

Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana level aktivitas dalam perusahaan yang berkaitan dengan *environmental disclosure and environmental accounting*?
2. Bagaimana level keterlibatan akuntan dalam *environmental disclosure and environmental accounting*?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui level aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan *environmental disclosure and environmental accounting*.
2. Untuk mengetahui level keterlibatan akuntan dalam *environmental disclosure and environmental accounting*.

Landasan Teori

Menurut Adamson dan Sailer (1990) ada 4 point pokok yang harus mendapat perhatian auditor dalam mengaudit kebijakan perusahaan tentang lingkungan: (1) *remedial cost* atau biaya perbaikan. *Remedial cost* harus difokuskan kepada penanganan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan. (2) *asset impairment* atau kerusakan aktiva. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan diantaranya bagaimana bentuk pengukuran aset perusahaan yang diberlakukan sebagai depleksi. Dari sini dapat diketahui potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. (3) kewajiban kontingensi. Fokus utama kewajiban kontingensi ini diarahkan untuk menemukan kewajiban kontingensi perusahaan yang berhubungan dengan biaya perbaikan (*remedial cost*) akibat kontaminasi lingkungan. (4). Upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan. Ini merupakan indikator untuk menentukan tingkat keseriusan perusahaan dalam menangani masalah-masalah lingkungan hidup.

Elemen Akuntansi Lingkungan

Gray et al (1993) menjelaskan tentang elemen akuntansi lingkungan yang memberi pedoman bagi perusahaan untuk mengatur perusahaan sedemikian rupa ataupun merubah kebijakan perusahaan menuju ke arah perusahaan

yang peduli lingkungan. Elemen akuntansi lingkungan tersebut dapat dilihat pada tabel 1

Pengertian Audit Lingkungan

Heruppoetri (1993) mendefinisikan audit lingkungan adalah evaluasi sistematis dan obyektif dari dampak yang ada maupun potensial dampak dari kegiatan suatu organisasi atas lingkungan. Apa yang dievaluasi biasanya termasuk pengelolaan lingkungan dari organisasi tersebut, ketaatan kepada peraturan pengelolaan lingkungan seperti emisi ke udara, pembuangan limbah ke air, pengelolaan limbah, termasuk pula manajemen komunikasi dan kursus-kursus yang diberikan kepada stafnya perihal masalah lingkungan.

Karakteristik Audit lingkungan

Menurut Neam (1994) dalam Bebbington et al (1994) ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk penerapan audit lingkungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan proaktif dan sukarela
- b. Frekuensinya tergantung keperluan
- c. Pernyataan tentang besarnya kesesuaian tercapainya kondisi lingkungan terhadap sasaran perusahaan
- d. Umumnya bersifat internal, dilakukan oleh akuntan internal atau eksternal

Kegunaan audit lingkungan

1. Untuk mengecek dan menguji kinerja program lingkungan dari suatu organisasi secara berkala. Pengujian secara berkala ini akan memperbaiki penerapan rekomendasi dalam dokumen penting dalam proses AMDAL, yaitu RKL (rencana kerja lingkungan) dan RPL (rencana pemantauan lingkungan).
2. menjamin adanya database lingkungan yang menyeluruh untuk pengelolaan yang kewaspadaan serta pengambilan keputusan untuk pemantauan fasilitas yang telah dan akan dibangun.
3. Membantu pihak yang berwenang di bidang lingkungan dengan memberi informasi aktivitas organisasi dalam mengelola lingkungan.
4. Mendongkrak citra perusahaan sebagai perusahaan yang bonafid

dan dapat dipercaya dengan tumbuhnya kesadaran lingkungan dari masyarakat.

Audit lingkungan merupakan suatu proses intern perusahaan, pihak luar dapat menjalankan fungsinya sebagai *internal control*. Proses yang dilakukan untuk audit lingkungan haruslah dilakukan secara menyeluruh termasuk melakukan audit organisasi dan personilnya, penyidikan lapangan (*on-site investigation*) dengan mewawancarai staff dengan variasi jabatannya, menganalisis dokumen-dokumen terkait, yang pada akhirnya dilakukan pelaporan audit dan rekomendasi tindak lanjut kegiatan. (heroeputri,2003).

Agar audit lingkungan dapat berjalan dengan efektif, pertama perlu dukungan dan komitmen dari perusahaan agar mau terbuka dan jujur dalam memberikan data. Kedua, adanya auditor yang independen yang tidak mempunyai kepentingan apapun atas fasilitas yang sedang diaudit.

Metode Penelitian

Obyek Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey (eksploratif) yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Obyek penelitian ini adalah para akuntan yang bekerja pada perusahaan manufaktur yang potensial mempunyai limbah dari proses produksinya

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua akuntan internal yang bekerja pada perusahaan manufaktur yang ada di Semarang. Sedangkan sampel penelitian ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu akuntan internal perusahaan manufaktur yang potensial mencemari lingkungan berdasarkan data dari Bapedal dan Forum Pengusaha Semarang. Adapun perusahaan-perusahaan yang bersedia menjadi obyek penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Pemilihan perusahaan ini didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan yang potensial memiliki masalah limbah pasti menghadapi masalah pengelolaan limbah tersebut dan bagaimana tindakan mereka untuk mencerminkan sadar akan

Tabel 2
Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	Responden	Kembali	Sumber Data
1	PT. Nissin Biscuit Indonesia	1	1	Bapedal
2	Perusahaan Tahu Jakarta-Blatar	2	2	Forum ush
3	PT. Koryo Puspita	6	6	Forum ush
4	PTP Kare!	10	10	Forum ush
5	PT. Nyonya Meneer	2	2	Forum ush
6	PT. Sinar Sosro	1	-	Forum ush
7	PTP Gebugan	5	5	Forum ush
8	PT. Poliplas	3	3	Forum ush
9	PT. Bina Guna Kimia	3	3	Forum ush
10	PT. Erlimpex	1	-	Forum ush
11	PT. Kamaltex	10	10	Forum ush
12	PT. Gratia	5	5	Forum ush
JUMLAH		72	49	

kelestarian lingkungan. Dari masing-masing perusahaan, disebarakan kuesioner untuk para akuntan internal atau bagian keuangan. Kami memilih responden seperti tersebut diatas, karena kami memperkirakan bahwa responden tersebut dapat merefleksikan pengalamannya dan pengetahuannya serta pendapat mereka tentang keterlibatan mereka (akuntan) dalam menanggapi *issue-issu* lingkungan dari organisasi dimana mereka bekerja.

Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner berisi 3 bagian, yaitu bagian pertama berisi data latar belakang perusahaan. Bagian kedua berisi aktivitas perusahaan saat ini yang berhubungan dengan masalah lingkungan termasuk inisiatif akuntansi dan keterlibatan akuntan. bagian ketiga berisi informasi tentang respon dan perilaku mereka berkaitan dengan berbagai macam *issue* lingkungan.

Jenis Data

Dalam penelitian ini kami menggunakan data primer berupa opini dari responden untuk menjawab kuesioner yang akan kami bagikan. Responden yang dipakai dalam penelitian ini adalah kepala bagian akuntansi dan akuntan

internal. Alasan menggunakan responden seperti tersebut diatas adalah (1) peneliti ingin mengetahui secara langsung tanggapan akuntan dan tenaga bagian akuntansi berkaitan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan. (2) para responden berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu kebijakan-kebijakan perusahaan dalam masalah lingkungan. (3) para responden seringkali terlibat dalam perumusan dan pengambilan keputusan tentang *issue-issu* lingkungan. Dalam penelitian ini kami menekankan aspek pengetahuan (*knowledge*), kesempatan (*opportunity*) dan kemauan sendiri (*volition*) dari para akuntan berkaitan dengan masalah lingkungan yang dihadapi perusahaan dimana dia bekerja (mengaudit).

Langkah Analisis

Data dari hasil jawaban responden akan kami tabulasikan dengan cara sebagai berikut:

1. Tabulasi tentang gambaran singkat opini responden tentang level aktivitas dalam perusahaan yang berkaitan dengan *environmental disclosure and environmental accounting*. yang disajikan dalam persentase.
2. Memberi gambaran diskriptif statistik persepsi akuntan tentang level keterlibatan akuntan dalam

environmental disclosure and environmental accounting.

Analisis tentang score perilaku perusahaan dan hubungannya dengan faktor-faktor lain yang dibahas dalam penelitian.

2. Pembahasan

2.1. Penelitian

Penelitian ini dijabarkan kedalam tiga bagian, yaitu bagian pertama berisi analisis singkat pendapat responden tentang level aktivitas perusahaan tempat mereka bekerja berkaitan dengan pengungkapan masalah lingkungan. Bagian kedua berisi tentang deskriptif persepsi akuntansi tentang level pengungkapan masalah lingkungan. Bagian ketiga berisi analisis skor sikap responden dan hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan masalah lingkungan perusahaan.

1. Aktivitas Perusahaan Berkaitan dengan Pengungkapan Masalah Akuntansi Lingkungan

Tujuan penggambaran tentang aktivitas perusahaan berhubungan dengan pengungkapan akuntansi lingkungan adalah untuk mengetahui seberapa banyak dan besar perhatian perusahaan berkaitan dengan masalah lingkungan yang dihadapi perusahaan tersebut dan dalam bentuk apa pengungkapan itu dilakukan. Untuk lebih jelasnya hasil tabulasi jawaban responden dapat dilihat pada tabel 3.

2. Keterlibatan akuntansi dan akuntan Internal Perusahaan dalam Melakukan Pengungkapan masalah Lingkungan

Tujuan penggambaran ini adalah untuk mengetahui (1) status akuntansi perusahaan berkaitan dengan masalah sosial lingkungan, seluas apa pengungkapan yang telah dilakukan perusahaan. (2) Bagaimana keterlibatan

akuntan internal perusahaan dalam pengungkapan terhadap masalah lingkungan. Jawaban tentang kedua hal tersebut diatas, dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5.

Berdasarkan tabel 4, peran akuntansi dalam pengungkapan masalah lingkungan yang banyak dilakukan oleh perusahaan yang potensial mencemari lingkungan di Semarang adalah: (1) masalah energi (2) kepatuhan terhadap peraturan pemerintah tentang lingkungan (3) anggaran untuk masalah lingkungan. Sedangkan yang belum banyak dilakukan adalah (1) daur ulang limbah (2) pencemaran tanah dan udara (3) hutang bersyarat yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji dalam tabel 6, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penentuan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan (seperti pemilihan sarana transportasi, kemasan produk yang mudah di daur ulang). Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 3.3, mengarah pada jawaban ragu-ragu. Dan hanya 47% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini.
- Penentuan kebijakan perusahaan tentang siklus produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan. Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 3.5, mengarah pada nilai hampir terlibat. Dan ada 61% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini.
- Penentuan kebijakan riset dan pengembangan yang berorientasi pada lingkungan. Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 2.9, mengarah pada jawaban ragu-ragu. Dan hanya ada 39% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini. (Tabel 5).
- Penentuan pusat aktivitas pengendalian lingkungan. Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 3.1 mengarah pada jawaban ragu-ragu. Dan hanya 43% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini.
- Menilai laporan investasi (misalnya peralatan daur ulang, alat uji tingkat pemasaran, dll). Nilai rata-rata untuk

Tabel 3

Pernyataan Responden Perihal Pengungkapan Masalah Akuntansi Lingkungan yang Dilakukan Perusahaan

Tingkat pengungkapan			Aktivitas		Alasan	
Kategori	%	n	keterangan	%	keterangan	%
Tinggi	53%	26	Melakukan pengungkapan	65,4%	Bangga dapat mengungkapkan masalah lingkungan	8,2%
			Mempublikasikan kebijakan masalah lingkungan	15,4%	Akuntabilitas (pemilik dan masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar tentang sikap dan tindakan perusahaan dalam menanggapi masalah lingkungan)	87,8%
			Menyiapkan data kuantitatif atau laporan keuangan	19,2%	Kepatuhan (compliance)	4%
			100%		100%	
Rendah	47%	23	Bermaksud menyusun pengungkapan masalah akuntansi lingkungan dimasa yang akan datang	91,3%	Tidak yakin bahwa masalah akuntansi sosial lingkungan akan cepat berkembang dimasa yang akan datang	26,5%
			Bermaksud menyediakan data kuantitatif dan atau laporan keuangan dimasa yang akan datang	8,7%	Tidak ada peraturan resmi dari pemerintah untuk melakukan pengungkapan tentang akuntansi sosial lingkungan	69,4%
					Tidak pernah tahu tentang akuntansi sosial lingkungan	4,1%
100%		49	100%		100%	

Sumber: data primer yang diolah

dan dapat dipercaya dengan tumbuhnya kesadaran lingkungan dari masyarakat.

Audit lingkungan merupakan suatu urusan intern perusahaan, pihak luar dapat menjalankan fungsinya sebagai *external control*. Proses yang dilakukan untuk audit lingkungan haruslah dilakukan secara menyeluruh termasuk melakukan audit organisasi dan personilnya, penyidikan lapangan (*on-site investigation*) dengan mewawancarai staff dengan variasi jabatannya, menganalisis dokumen-dokumen terkait, yang pada akhirnya dilakukan pelaporan audit dan rekomendasi tindak lanjut kegiatan. (heroeputri,2003).

Agar audit lingkungan dapat berjalan dengan efektif, pertama perlu dukungan dan komitmen dari perusahaan agar mau terbuka dan jujur dalam memberikan data. Kedua, adanya auditor yang independen yang tidak mempunyai kepentingan apapun atas fasilitas yang sedang diaudit.

Metode Penelitian

Obyek Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey (eksploratif) yang dilakukan dengan cara menyebar kuesioner. Obyek penelitian ini adalah para akuntan yang bekerja pada perusahaan manufaktur yang potensial mempunyai limbah dari proses produksinya

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua akuntan internal yang bekerja pada perusahaan manufaktur yang ada di Semarang. Sedangkan sampel penelitian ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu akuntan internal perusahaan manufaktur yang potensial mencemari lingkungan berdasarkan data dari Bapedal dan Forum Pengusaha Semarang. Adapun perusahaan-perusahaan yang bersedia menjadi obyek penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Pemilihan perusahaan ini didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan yang potensial memiliki masalah limbah pasti menghadapi masalah pengelolaan limbah tersebut dan bagaimana tindakan mereka untuk mencerminkan sadar akan

Tabel 2
Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	Responden	Kembali	Sumber Data
1	PT. Nissin Biscuit Indonesia	1	1	Bapedal
2	Perusahaan Tahu Jakarta-Biater	2	2	Forum ush
3	PT. Koryo Puspita	6	6	Forum ush
4	PTP Karet	10	10	Forum ush
5	PT. Nyonya Meneer	2	2	Forum ush
6	PT. Sinar Sosro	1	-	Forum ush
7	PTP Gebugan	5	5	Forum ush
8	PT. Poliplas	3	3	Forum ush
9	PT. Bina Guna Kimia	3	3	Forum ush
10	PT. Erlimpex	1	-	Forum ush
11	PT. Kamallex	10	10	Forum ush
12	PT. Gratia	5	5	Forum ush
JUMLAH		72	49	

kelestarian lingkungan. Dari masing-masing perusahaan, disebarkan kuesioner untuk para akuntan internal atau bagian keuangan. Kami memilih responden seperti tersebut diatas, karena kami memperkirakan bahwa responden tersebut dapat merefleksikan pengalaman dan pengetahuannya serta pendapat mereka tentang keterlibatan mereka (akuntan) dalam menanggapi *issue-isue* lingkungan dari organisasi dimana mereka bekerja.

Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner berisi 3 bagian, yaitu bagian pertama berisi data latar belakang perusahaan. Bagian kedua berisi aktivitas perusahaan saat ini yang berhubungan dengan masalah lingkungan termasuk inisiatif akuntansi dan keterlibatan akuntan. bagian ketiga berisi informasi tentang responden dan perilaku mereka berkaitan dengan berbagai macam *issue* lingkungan.

Jenis Data

Dalam penelitian ini kami menggunakan data primer berupa opini dari responden untuk menjawab kuesiner yang akan kami bagikan. Responden yang dipakai dalam penelitian ini adalah kepala bagian akuntansi dan akuntan

internal. Alasan menggunakan responden seperti tersebut diatas adalah (1) peneliti ingin mengetahui secara langsung tanggapan akuntan dan tenaga bagian akuntansi berkaitan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan. (2) para responden berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu kebijakan-kebijakan perusahaan dalam masalah lingkungan. (3) para responden seringkali terlibat dalam perumusan dan pengambilan keputusan tentang *issue-isue* lingkungan. Dalam penelitian ini kami menekankan aspek pengetahuan (*knowledge*), kesempatan (*opportunity*) dan kemauan sendiri (*volition*) dari para akuntan berkaitan dengan masalah lingkungan yang dihadapi perusahaan dimana dia bekerja (mengaudit).

Langkah Analisis

Data dari hasil jawaban responden akan kami tabulasikan dengan cara sebagai berikut:

1. Tabulasi tentang gambaran singkat opini responden tentang level aktivitas dalam perusahaan yang berkaitan dengan *environmental disclosure and environmental accounting*, yang disajikan dalam persentase.
2. Memberi gambaran diskriptif statistik persepsi akuntan tentang level keterlibatan akuntan dalam:

Environmental disclosure and environmental accounting. Analisis tentang score perilaku perusahaan dan hubungannya dengan faktor-faktor lain yang dibahas dalam penelitian.

Dan Pembahasan

Penelitian

Hasil penelitian ini dijabarkan kedalam tiga bagian, yaitu bagian pertama berisi analisis singkat pendapat responden tentang level aktivitas perusahaan tempat mereka bekerja berkaitan dengan pengungkapan masalah lingkungan. Bagian kedua berisi tentang deskriptif sikap persepsi akuntansi tentang level keterbukaan dengan aktivitasnya dalam pengungkapan masalah lingkungan. Bagian ketiga berisi analisis skor sikap perusahaan dan hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan masalah lingkungan dalam perusahaannya.

1. Aktivitas Perusahaan Berkaitan dengan Pengungkapan Masalah Akuntansi Lingkungan

Tujuan penggambaran tentang aktivitas perusahaan berhubungan dengan pengungkapan akuntansi lingkungan adalah untuk mengetahui seberapa banyak dan besar perhatian perusahaan berkaitan dengan masalah lingkungan yang dihadapi perusahaan tersebut dan dalam bentuk apa pengungkapan itu dilakukan. Untuk lebih jelasnya hasil tabulasi jawaban responden dapat dilihat pada tabel 3.

2. Keterlibatan akuntansi dan akuntansi Internal Perusahaan dalam Melakukan Pengungkapan masalah Lingkungan

Tujuan penggambaran ini adalah untuk mengetahui (1) status akuntansi perusahaan berkaitan dengan masalah sosial lingkungan, seluas apa pengungkapan yang telah dilakukan perusahaan. (2) Bagaimana keterlibatan

akuntan internal perusahaan dalam pengungkapan terhadap masalah lingkungan. Jawaban tentang kedua hal tersebut diatas, dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5.

Berdasarkan tabel 4, peran akuntansi dalam pengungkapan masalah lingkungan yang banyak dilakukan oleh perusahaan yang potensial mencemari lingkungan di Semarang adalah: (1) masalah energi (2) kepatuhan terhadap peraturan pemerintah tentang lingkungan (3) anggaran untuk masalah lingkungan. Sedangkan yang belum banyak dilakukan adalah (1) daur ulang limbah (2) pencemaran tanah dan udara (3) hutang bersyarat yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji dalam tabel 6, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penentuan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan (seperti pemilihan sarana transportasi, kemasan produk yang mudah di daur ulang). Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 3.3, mengarah pada jawaban ragu-ragu. Dan hanya 47% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini.
- Penentuan kebijakan perusahaan tentang siklus produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan. Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 3.5, mengarah pada nilai hampir terlibat. Dan ada 61% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini.
- Penentuan kebijakan riset dan pengembangan yang berorientasi pada lingkungan. Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 2.9, mengarah pada jawaban ragu-ragu. Dan hanya ada 39% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini. (Tabel 5).
- Penentuan pusat aktivitas pengendalian lingkungan Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 3.1 mengarah pada jawaban ragu-ragu. Dan hanya 43% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini.
- Menilai laporan investasi (misalnya peralatan daur ulang, alat uji tingkat pemasaran, dll). Nilai rata-rata untuk

Tabel 3
Pernyataan Responden Perihal Pengungkapan Masalah Akuntansi Lingkungan yang Dilakukan Perusahaan

Tingkat pengungkapan	Aktivitas		Alasan			
	Angka	%	keterangan	%		
tinggi	53%	26	Melakukan pengungkapan	65,4%	Bangga dapat mengungkapkan masalah lingkungan	8,2%
			Mempublikasikan kebijakan masalah lingkungan	15,4%	Akuntabilitas (pemilik dan masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar tentang sikap dan tindakan perusahaan dalam menanggapi masalah lingkungan)	87,8%
			Menyiapkan data kuantitatif atau laporan keuangan	19,2%	Kepatuhan (compliance)	4%
			100%		100%	
sedang	47%	23	Bermaksud menyusun pengungkapan masalah akuntansi lingkungan dimasa yang akan datang	91,3%	Tidak yakin bahwa masalah akuntansi sosial lingkungan akan cepat berkembang dimasa yang akan datang	26,5%
			Bermaksud menyediakan data kuantitatif dan atau laporan keuangan dimasa yang akan datang	8,7%	Tidak ada peraturan resmi dari pemerintah untuk melakukan pengungkapan tentang akuntansi sosial lingkungan	69,4%
					Tidak pernah tahu tentang akuntansi sosial lingkungan	4,1%
	100%	49	100%		100%	

Sumber: data primer yang diolah

pertanyaan ini adalah 3.1, mengarah pada jawaban ragu-ragu. Dan hanya 37% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini.

f. Mengaudit/mereview masalah lingkungan. Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 2.8, mengarah pada jawaban ragu-ragu. Dan hanya 33% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini.

g. Mereview/mengaudit pemborosan karena masalah lingkungan. Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 3.06, mengarah pada jawaban ragu-ragu. Dan hanya 37% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini.

h. Penentuan dampak produksi perusahaan terhadap lingkungan. Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 3.31, mengarah pada jawaban ragu-ragu. Dan hanya 45% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini.

i. Analisa kemungkinan pengembangan usaha dengan orientasi ramah lingkungan.

Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 3.5, mengarah pada jawaban ikut dilibatkan. Dan ada 61% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini.

j. Menganalisa siklus hidup produk dan dampaknya. Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 3.5 mengarah pada jawaban ragu-ragu. Dan ada 61% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini.

k. Mengungkapkan masalah lingkungan dalam laporan keuangan. Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 3, mengarah pada jawaban ragu-ragu. Dan hanya 49% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini.

l. Mengungkapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah lingkungan dalam laporan tahunan. Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 3.18, mengarah pada jawaban ragu-ragu.

Tabel 5
Keterlibatan Akuntansi Internal Perusahaan Dalam Pengungkapan Terhadap Masalah Lingkungan

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Total nilai	164	172	144	150	150	139	150	162	173	149	156	167	139
Nilai rata-rata	3.3	3.5	2.9	3.1	3.1	2.8	3.06	3.31	3.5	3.5	3	3.18	3.04
Jawab-an positif	23	30	19	21	18	16	18	22	30	30	24	25	17
% jawaban positif	47%	61%	39%	43%	37%	33%	37%	45%	61%	61%	49%	51%	35%

Sumber: data primer yang diolah

dan hanya 51 responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini.

m. Pembuatan anggaran tentang masalah lingkungan. Nilai rata-rata untuk pertanyaan ini adalah 2.84, mengarah pada jawaban ragu-ragu. Dan hanya 35% responden yang menyatakan diikutkan terlibat dalam kebijakan ini.

Berdasarkan uraian diatas, hampir semua item dijawab ragu-ragu oleh akuntan, hanya beberapa saja item yang lebih dari 50% menyatakan ikut dilibatkan, yaitu kebijakan tentang:

1. Penentuan kebijakan perusahaan tentang siklus produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan
2. Analisa kemungkinan pengembangan usaha dengan orientasi ramah lingkungan
3. Menganalisa siklus hidup produk dan dampaknya
4. Mengungkapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah lingkungan dalam laporan tahunan
3. Opini Responden Tentang Keterlibatan Akuntan Internal Dalam Masalah Lingkungan Perusahaan

Tujuan penggambaran tersebut adalah untuk mengetahui persepsi akuntan sendiri tentang bagaimana seharusnya mereka terlibat dalam masalah lingkungan yang dihadapi perusahaan. Secara ringkas gambaran opini akuntan internal tentang keterlibatannya dapat dilihat pada tabel 6.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntan internal

sebenarnya telah banyak yang menyadari bahwa diri dan profesinya harus banyak berperan dalam penanganan masalah akuntansi sosial lingkungan. Banyak butir-butir pertanyaan yang sifatnya peningkatan peran akuntan yang dipilih oleh responden meskipun ada beberapa yang masih pesimis akan peran akuntan, terutama dalam kepatuhan. Akuntan masih pesimis pemerintah dan profesinya akan segera membuat peraturan tentang lingkungan dalam waktu dekat ini. Dan justru beranggapan bahwa penanganan masalah lingkungan itu akan terjadi bukan karena kesadaran perusahaan tetapi karena ada peraturan yang mengikat, sementara peraturan sendiri belum dibuat di Indonesia.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Tingkat aktivitas dalam perusahaan yang berkaitan dengan *environmental disclosure and environmental accounting* menurut persepsi responden ternyata masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tabulasi jawaban responden bahwa baru 53% perusahaan yang dijadikan responden telah melakukan pengungkapan masalah lingkungan.
2. Keterlibatan akuntan dalam *environmental disclosure and environmental accounting* yang paling banyak adalah dalam hal menganalisis kemungkinan pengembangan usaha yang berorientasi pada ramah lingkungan. Sedangkan tingkatan terendah keterlibatan akuntan dalam *environmental disclosure and*

Tabel 6

Responden Tentang Keterlibatan Akuntan Internal Dalam Masalah Lingkungan Perusahaan

Opini yang optimistik atas peran akuntan profesi terhadap akuntansi sosial lingkungan	Opini yang pesimistik atas peran akuntan dan profesi terhadap akuntansi sosial lingkungan
<p>Peran akuntan:</p> <p>akuntan mengembangkan inovasi pengembangan sistem informasi lingkungan yang baru berkaitan dengan masalah lingkungan (75,5%) kontribusi terhadap sensitivitas lingkungan (59%) akuntan terlibat dalam penyiapan informasi lingkungan kepada manajemen (51%) akuntan organisasi profesi dalam menentukan masalah lingkungan akan datang dimasa yang akan datang (51%) akuntan banyak perubahan dalam peraturan akuntansi berkaitan dengan lingkungan (51%)</p>	<p>Keterlibatan akuntan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. akuntan harus membatasi perannya dalam penyiapan data keuangan untuk masalah lingkungan (47%) 2. akuntan terlibat dalam penyiapan informasi lingkungan (44,9%) 3. akuntan harus terlibat dalam semua masalah lingkungan yang dihadapi perusahaan. (16,3%) 4. pekerjaan akuntan meningkat secara signifikan tanpa harus merisaukan masalah lingkungan (36,7%) 5. akuntan harus menjadi inisiator jika pengungkapan masalah lingkungan belum terjadi. (42%) 6. issue lingkungan bukan materi akuntan (28,6%)
<p>Kepercayaan masyarakat:</p> <p>masyarakat berhak untuk memperoleh informasi tentang dampak lingkungan perusahaan (7,3%) pemegang saham membutuhkan informasi tentang masalah lingkungan yang dihadapi perusahaan (69%) perusahaan tidak ada dana untuk mengungkapkan masalah lingkungan. (18,4%) perusahaan menjadi sehat jika publik diberi informasi masalah lingkungan (75,5%) Pengungkapan masalah lingkungan akan menjadi praktek yang meluas dimasa yang akan datang ((51%)</p>	
<p>Keperluan (compliance):</p> <p>perusahaan membuat peraturan untuk mengungkapkan masalah lingkungan (69,4%) pemerintah harus meningkatkan persyaratan bagi perusahaan berkaitan masalah lingkungan (75,5%)</p>	<p>Kepatuhan (compliance):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. profesi membuat peraturan untuk mengungkapkan masalah lingkungan (hanya 35%) 2. pengungkapan masalah lingkungan merupakan masalah peraturan (50%)

Referensi: data yang diolah

Environmental accounting adalah salah satu aspek dalam pembuatan anggaran yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Peran akuntan internal tentang keterlibatannya dalam masalah lingkungan perusahaan ternyata cukup baik. Akuntan internal sangat fokus pada

harapan bahwa pemerintah harus membuat dan meningkatkan persyaratan bagi perusahaan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, dan berharap sekali kalau pengungkapan masalah lingkungan harus selalu melibatkan akuntan.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sulitnya mendapatkan responden dari perusahaan yang dalam catatan bapedal potensial mencemari lingkungan. Hal ini akan menyebabkan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan yang benar-benar potensial mencemari lingkungan tidak dapat tergalai.

Implikasi

Untuk penelitian berikutnya perlu dipertimbangkan untuk memperluas *scope* responden, mulai diperbanyak produk yang berwawasan lingkungan, peningkatan kerja sama perusahaan dengan kelompok lingkungan, keterlibatan perusahaan dan akuntan dalam mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan. (1)

DAFTAR PUSTAKA

Bebbington, K.J., Gray R. H., Thomson I., and Walters, D. 1994, Accountants' Attitudes and Environmentally-sensitive Accounting, *Accounting and Business Research*, Vol 4. No. 34 p.109 - 120.

Gray, R.H., 1990, Business Ethic and Organizational Change: Building A Trojan Horse or Rearrangeing Deckchairs on The Titanic?, *Managerial Auditing Journal*, Spring, p. 12-21.

Gray, R. H., Bebbington, K.J and Walters, D (1993), *Accounting and The Environment: The Greening of Accountancy Part II*, Acca. London.

Herupoctri (1993) , www. Goegle. com

IAI. 1999. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.

Thomas, Lee M. 1998. *Cost Accounting*. Prentice-Hall, Inc.

Tugiman, Firo. 1996. *Evolusi Audit Internal*. PT. Telkomunikasi Indonesia. Jakarta.

Rothery, Brian. 1996. *ISO 14000: Sistem Manajemen Lingkungan*. (terjemahan). Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.

Tardan, M. Agus. M, Sitawati dan Melania S. Muntini. 1997. *Audit Lingkungan*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tunggal, Amin Widjaja. 1995. *Audit Lingkungan: Suatu Pengantar*. Edisi Pertama. Gramedia.PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Thompson, *Environment in Ethics*. Edisi Pertama. McGraw-Hill, Inc. 1993